

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI**

***POLICY IMPLEMENTATION MASTER PLAN OF TOURISM
DEVELOPMENT IN SINJAI***



Nomor Induk Mahasiswa : 1050311013 21

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister



Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik
Kekhususan : Kebijakan Publik

Disusun dan Diajukan oleh :

MUHAMMAD IKHSAN

Nomor Induk Mahasiswa : 1050311013 21

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI

Yang disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD IKHSAN

Nomor Induk Mahasiswa : 1050311013 21

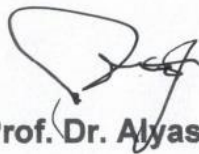
**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 28 Februari 2025**

Menyetujui

Komisi Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Alyas, M.Si

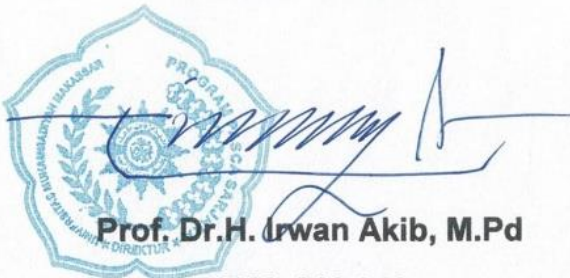


Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613 949
Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107 6424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IKHSAN

Nim : 105031101321

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan dipertahankan didepan Panitia Penguji Tesis pada tanggal 28 Februari 2025, dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Juli 2025

Tim Penguji :

Dr. A. Ifayani Haanurat, MM.

(Ketua Sidang)

Prof. Dr. Alyas, M.Si

(Pembimbing I)

Dr. Jaelan Usman, M.Si

(Pembimbing II)

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

(Penguji I)

Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

(Penguji II)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ikhsan


NIM : 1050311013 21

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Juli 2025

Yang menyatakan,


Muhammad Ikhsan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI**. Dan tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis beberapa kali mengalami hambatan dan tantangan, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan penulis hilang semangat dalam proses menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis menyadari bahwa dengan keikhlasan, usaha, serta doa maka akan membawakan kelancaran dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap kasih yang diberikan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Massalinri dan Darmah yang telah merawat, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa memberikan nasehat, harapan, serta memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tanpa pamrih dan pengorbanan yang tak terhingga. Dan kepada saudari ku, Arni Haerani S.M yang senantiasa mendukung dan memberikan fasilitas kepada penulis sehingga membantu

kelancaran penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Serta kepada seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibunda Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dan juga selaku Penasehat Akademik penulis yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Alyas, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing II yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaganya membimbing, dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh dosen dan staf pegawai di lingkup Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajar dan membantu penulis hingga penulis sampai ke jenjang ini.

7. Segenap Pemerintah Kabupaten Sinjai, yakni Bupati Sinjai beserta jajarannya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai beserta jajarannya, dan seluruh informan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

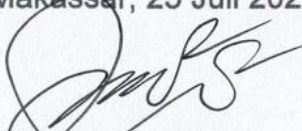
8. Rekan-rekan MIAP (Magister Ilmu Administrasi Publik) angkatan 2021 sebagai teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan.

9. Seluruh sahabat yang menyemangati dan membantu penulis dalam proses pembuatan tesis ini.

10. Dan semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu.

Dengan demikian, untuk kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Dan semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 Juli 2025



Muhammad Ikhsan

ABSTRAK

Muhammad Ikhsan. 2025. Implementasi Kebijakan Rencana Induk Kepariwisata di Kabupaten Sinjai.

Pariwisata adalah salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui pariwisata inilah bisa dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan jika dikelola dengan baik dan benar. Pariwisata juga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan devisa dan mengangkat eksistensi suatu negara. Dengan demikian dibutuhkan kesadaran negara melalui pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan dan mengelola pembangunan dan pengembangan dibidang kepariwisataan daerah. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu, lalu dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai telah berjalan cukup baik dengan komunikasi yang dilakukan melalui rapat kordinasi kepada setiap *stakeholder*. Namun sumber daya yang dimiliki masih mengalami kekurangan dari segi financial anggaran yang didapatkan dari APBN, APBD, DAK, DAU, dan dana hibah. Selanjutnya disposisi untuk pemberian insentif didapatkan dari upah atau gaji dan pengangkatan birokrasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Terakhir struktur birokrasi mengenai SOP sebagai acuan berjalan dengan baik dengan fragmentasi yang tanpa adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Kepariwisata.

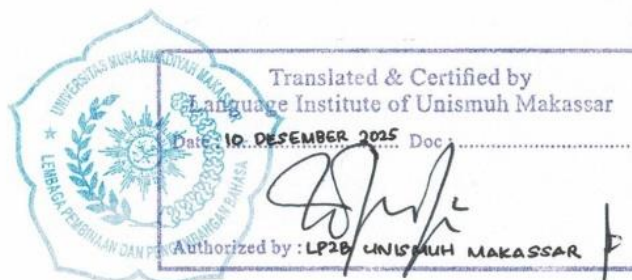
ABSTRACT

Muhammad Ikhsan, 2025. Implementation of the Tourism Development Master Plan Policy in Sinjai Regency. Supervised by Alyas and Jaelan Usman.

Tourism is one of Indonesia's major potentials. When properly managed, tourism can serve as a source of economic growth and employment opportunities. It also has the potential to increase foreign exchange earnings and enhance a country's international standing. Therefore, it requires the awareness of the government particularly local governments to utilize, to manage, and to develop regional tourism development initiatives. This study was conducted over a period of two months at the Department of Tourism and Culture of Sinjai Regency. The research employed a qualitative approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation. Data validation was carried out using source, technique, and time triangulation, and then they were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the implementation of the Tourism Development Master Plan policy in Sinjai Regency has been carried out well, supported by effective communication through coordination meetings with all relevant stakeholders. However, the available resources remain limited, particularly in terms of financial support derived from the national budget (APBN), regional budget (APBD), Special Allocation Funds (DAK), General Allocation Funds (DAU), and grants. Furthermore, the disposition regarding the provision of incentives is fulfilled through wages or salaries and bureaucratic appointments in accordance with the established rules and criteria. Lastly, the bureaucratic structure related to the Standard Operating Procedures (SOP) functions effectively, with fragmentation that does not result in overlapping duties and responsibilities.

Keywords: *Implementation, Policy, Tourism Development.*



DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Konsep dan Teori	25
1. Kebijakan Publik	25
2. Implementasi Kebijakan Publik	29
3. Pariwisata	35
4. Pembangunan Pariwisata	38
C. Kerangka Pikir	41
D. Fokus Penelitian	43
E. Deskripsi Fokus	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
C. Informan Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48

E. Teknik Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Letak dan Luas Wilayah	52
2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	53
B. Hasil Penelitian	53
1. Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata	54
2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata	70
C. Pembahasan Hasil Penelitian	106
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tinjauan Hasil Peneliti.....	19
1.2 Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan	28
2.1 Jumlah Wisatawan Objek Wisata Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023	62



DAFTAR GAMBAR

1.1 Faktor Keberhasilan Implementasi menurut Edward III	32
1.2 Faktor Keberhasilan Implementasi menurut Rippley dan Franklin	33
2.1 Faktor Keberhasilan Implementasi menurut Mazmanian & Sabatier	35
2.2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	50
3.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	53
3.2 Laporan Hasil Uji	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak potensi pariwisata yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah. Sehingga melalui pariwisata inilah bisa dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah juga masyarakat. Selain itu juga pariwisata bisa menjadi bagian dari industri besar yang memiliki potensi untuk mengangkat eksistensi suatu negara dan juga meningkatkan pendapatan devisa negara. Pariwisata memang memiliki peranan yang sangat penting, selain menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional pariwisata juga dapat menghasilkan keuntungan tersendiri dari bidang ekonomi maupun sosial apabila suatu daerah mampu mengelolanya dengan baik.

Dengan demikian dibutuhkan kesadaran negara melalui pemerintah daerah terhadap potensi pariwisata agar bisa dimanfaatkan dengan adanya pembangunan dan pengembangan dibidang pariwisata. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungannya (Simamora et al., 2016, hal.80).

Dalam pembangunan pariwisata pemerintah telah membagi tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah bisa mengembangkan pariwisata sesuai dengan ciri khas dari daerah masing-masing. Dalam melakukan pembangunan pariwisata tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut yang telah dibuat dan direncanakan dalam pembangunan pariwisata tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

Dalam skala nasional, pembangunan sektor pariwisata telah dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Kebijakan pembangunan sektor pariwisata mulai dimasukkan dalam undang-undang, keputusan presiden dan peraturan daerah. Untuk itu didalam mengatur dan menjalankan pengelolaan pariwisata secara nasional di Indonesia maka telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Maka dengan adanya ketentuan kebijakan berupa undang-undang sektor pariwisata, selanjutnya setiap daerah diharapkan memiliki upaya dalam melaksanakan amanah undang-undang tersebut demi terwujudnya tujuan bersama khususnya dibidang pariwisata.

Undang-undang pariwisata sebagaimana kebijakan yang telah dibentuk pada dasarnya merupakan salah satu upaya dari pemerintah

untuk mengatasi masalah kepariwisataan dan juga mencapai tujuan kepariwisataan. Sehingga kebijakan yang telah dibentuk sangat penting untuk diimplementasikan. Sebab implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan, dimana kegiatannya berupa segala tindakan dari implementor kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, karena pada tahap inilah sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Sehingga tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam (Ramadani, 2019, hal.6). Ada pun menurut (Khan & Khandaker, 2016, hal.541) untuk mencapai keberhasilan *outcome* kebijakan tidak hanya bergantung pada pengembangan sistem yang efektif tetapi juga bergantung pada pengelolaan dari implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana suatu kebijakan apabila telah dibentuk maka sudah seharusnya untuk dilaksanakan guna mencapai sasaran yang dituju. (Hidayat et al., 2018, hal.87) juga menjelaskan bahwa unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau

sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Dengan begitu, maka kebijakan yang mengatur tentang kepariwisataan sudah sepatutnya dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata agar tujuan dan hasil yang diharapkan bisa tercapai.

Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan di Indonesia karena memiliki prospek yang sangat besar untuk dikembangkan, Pitana & Gayatri dalam (Lisa et al., 2017, hal.152). Selain itu, pariwisata merupakan industri yang sangat berpotensi untuk menjadi instrumen peningkatan penyerapan tenaga kerja karena industri pariwisata merupakan industri padat karya dan perkembangannya saat ini terbilang cepat (Tulumang et al., 2019, hal.25). Kemudian (Kiwang & Arif, 2020, hal.88) juga menjelaskan bahwa dampak positif dari kehadiran pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pariwisata juga telah menjadi dinamisor kehidupan sosial budaya masyarakat karena memberi manfaat kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, mendorong ekspor dan mengubah struktur perekonomian masyarakat lebih baik.

Oleh karena itu, jika pemerintah berkomitmen dalam menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian negara maka pariwisata perlu dijadikan sebagai prioritas pembangunan negara menurut Brahmento dalam (Salahudin Saiman, 2022, hal.342). Selain itu yang perlu diperhatikan juga bahwa implementasi pengembangan pariwisata

memerlukan penyesuaian dengan aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Sehingga diharapkan melalui implementasi kebijakan akan mendukung aspek pemberdayaan masyarakat (Sinaga et al., 2021, hal.81). Fenomena ini harus menjadi perhatian para pembantu kebijakan sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasilan devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha (Lengkong & Tampongangoy, 2015, hal.1).

Ada pun peranan daerah dalam membangun kepariwisataan daerah secara *massive* telah menjadi poin penting untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan mempopulerkan daerah di tingkat nasional, sekaligus memberi kontribusi dalam peningkatan kepariwisataan nasional Indonesia, Oka dalam (Rifan & Fikriya, 2021, hal.145). Selain itu juga penting bagi pemerintah melalui kebijakannya mengembangkan potensi obyek wisata dalam wujud pembangunan pariwisata (Pramana et al., 2022, hal.180).

Mengingat pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi, maka potensi kepariwisataan

di Kabupaten Sinjai harus dibina dan dikembangkan secara optimal, terarah dan terpadu sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah. Jika dilihat dari potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai, terdapat beberapa destinasi wisata yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, yaitu ; Taman Purbakala Batu Pake Gojeng, Benteng Balangnipa, Air Terjun Batu Barae, Taman Hutan Raya, Hutan Bakau Tongke-Tongke, Pulau Larea-rea, dan Air Terjun Lembang Saukang (Sumber : www.sinjaikab.go.id).

Dengan adanya potensi-potensi wisata tersebut maka pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Sehingga pemerintah daerah wajib dengan konsisten mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah (Purnamaningrum & Tri Nugroho, 2022, hal.36). Jika diamati kondisi sektor pariwisata yang ada tentu sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak pemasukan pada pendapatan daerah tetapi sebaiknya bisa memberikan juga dampak positif kepada masyarakat baik itu dalam bentuk kesempatan lapangan kerja, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ramdhan, 2018, hal.3) bahwa sektor pariwisata dapat

dikatakan sektor yang siap dalam penyerapan tenaga kerja karena tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru tetapi juga dapat menghidupkan pekerja yang ada disekitar tempat wisata tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh (Gunawan et al., 2016, hal.2) bahwa pengembangan pariwisata ikut berperan dalam pergerakan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan baik masyarakat itu sendiri maupun negara, khususnya Pemerintah Daerah. Pariwisata juga bisa menjadi penunjang alternatif perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Sanjaya dalam (Apriliani et al., 2022, hal.47) sektor pariwisata memiliki peran dan fungsi strategis dalam pembangunan dan selain pendapatan daerah pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu peranan sektor pariwisata yang juga sangat baik dalam menyerap tenaga kerja, membuatnya menjadi salah satu sektor yang patut dikembangkan agar bisa menjadi wadah dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas (Wahyu & Triani, 2023, hal.20).

Pada akhirnya pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sektor*) dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional, dan turut mendorong pembangunan di daerah (Amri, 2020). Sedangkan (Lesmana & Purwanti, 2017, hal.845) juga berpendapat bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai faktor andalan dan unggulan dalam arti luas yang mampu menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan ekonomi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha karena pariwisata termasuk industri padat karya serta meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan berbagai dampak itulah sehingga menjadikan pariwisata adalah lokomotif pembangunan yang menarik semua sektor untuk bergerak maju (Handono, 2022, hal.42). Selain itu juga bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak yang dinilai positif, yaitu dampak terhadap peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya (Sukmana, 2018, hal.429).

Berdasarkan dampak positif dari pembangunan pariwisata yang didapatkan, maka tentunya pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga memberikan perubahan yang lebih baik terhadap pariwisata daerah. Untuk itu melalui kebijakan Peraturan

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033, pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang sebagai leading sektor tentunya menjadi ujung tombak pelaksanaan dari pada pembangunan pariwisata daerah. Tentunya dengan adanya peraturan daerah yang dibuat maka akan lebih memudahkan arah pemerintah daerah didalam menjalankan pembangunan kepariwisataan.

Kebijakan dalam hal ini peraturan daerah yang telah dibuat tentu perlu untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan dari pada isi kebijakan itu sendiri. Ada pun maksud dan tujuan dari isi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033 sebagaimana yang tercantum pada Bab III pasal 4 meliputi maksud dari RIPPARKAB yaitu untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, penentuan kawasan wisata unggulan, dan penentuan sasaran pengembangan. Selanjutnya pada pasal 5 disebutkan bahwa tujuan RIPPARKAB yaitu memberikan arah pembangunan kepariwisataan kabupaten, memberikan pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata kabupaten, dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan tentunya memiliki tiga poin yang menjadi

maksud dan tujuan kebijakan tersebut untuk dilaksanakan dan dicapai yaitu untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, penentuan kawasan wisata unggulan dan penentuan sasaran pengembangan. Sebagaimana dalam proses mencapai keselarasan pembangunan kepariwisataan sebaiknya memperhatikan beberapa aspek keseimbangan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Sehingga konsep pembangunan yang perlu untuk diperhatikan untuk bersinergi meliputi pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh (Yoeti, 2008, hal.52) bahwa pembangunan pariwisata yang selaras harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, yang mencakup aspek ekonomi (peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat), sosial (pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat), dan lingkungan (konservasi sumber daya alam dan pengelolaan dampak negatif wisata). Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan yang dilakukan diharapkan tidak hanya mengutamakan infrastruktur fisik saja akan tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selanjutnya dalam hal menentukan kawasan wisata unggulan pada suatu daerah perlu dilihat dari potensi wisata yang dimiliki. Hal tersebut untuk memberikan penawaran yang menarik kepada wisatawan agar ingin berkunjung menikmati objek wisata tersebut. Sehingga objek wisata tersebut sebaiknya memiliki hal unik dan berbeda yang bisa diberikan kepada para wisatawan yang datang. Seperti yang diungkapkan oleh

(Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, 2005) menjelaskan bahwa wisata unggulan adalah destinasi atau objek wisata yang memiliki daya tarik khas dan mampu menjadi ikon utama suatu daerah.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan pariwisata tentunya juga memiliki sasaran untuk pengembangan. Sebagaimana sasaran pengembangan pariwisata adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah atau negara. Salah satu yang menjadi sasaran pengembangan pariwisata yang bisa dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja. Sehingga dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka bisa memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat lokal. Seperti yang diungkapkan oleh (Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, 2008) bahwa sasaran pengembangan pariwisata diantaranya memberikan peningkatan kontribusi ekonomi yaitu pariwisata harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal mengelola dan mengembangkan pariwisata memiliki banyak potensi destinasi wisata, salah satunya kawasan destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Saat ini pemerintah Kabupaten Sinjai sedang bertekad untuk menjadikan kawasan destinasi wisata tersebut sebagai tempat wisata unggulan, sehingga dalam proses pengembangannya tentu ada banyak hal yang

penting untuk diperhatikan. Menurut (Nyoman Jamin Ariana & Ariana, 2020, hal.3) mengatakan bahwa suatu destinasi agar dapat menjadi unggul dibandingkan dengan destinasi lain harus tersedia dan didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam dan fisik, pengetahuan, modal, prasarana dan sarana pariwisata, sumber daya sejarah dan budaya, serta besaran ekonomi yang ada pada daerah tersebut.

Sumber daya manusia dalam dunia kepariwisataan tidak hanya berguna sebagai tenaga kerja saja, akan tetapi menjadi peran utama dalam menciptakan pengalaman berwisata yang berkualitas. Sebab layanan yang diberikan oleh tenaga kerja sangat mempengaruhi nilai kepuasan bagi pengunjung. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan SDM di sektor pariwisata sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang umum dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan standar industri pariwisata. Selain itu, untuk mencapai predikat unggul dalam pariwisata tentunya juga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana wisata mencakup berbagai elemen penting seperti aksesibilitas transportasi, fasilitas akomodasi, pusat informasi wisata, hingga fasilitas penunjang lainnya seperti tempat parkir, toilet umum, musholah, dan area rekreasi. Semakin baik sarana dan prasarana yang disediakan, maka semakin baik pula destinasi wisata itu dikunjungi.

Pembangunan sektor pariwisata selain bergantung pada sumber daya, sarana dan prasarana, tentunya juga sangat bergantung pada modal yang dimiliki. Modal berperan penting dalam membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing tinggi. Ketersediaan modal finansial memungkinkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. Meskipun demikian, tantangan utama yang sering dihadapi oleh industri pariwisata adalah keterbatasan akses terhadap modal. Sehingga banyak destinasi wisata potensial yang sulit berkembang karena minimnya investasi yang masuk, baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Tantangan lain yang sedang dihadapi dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tengke yakni pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek meliputi : aspek lingkungan, sosial, partisipasi masyarakat, dan ekonomi guna mencapai keselarasan dalam pembangunan kepariwisataan. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Wibowo & Belia, 2023, hal. 25) bahwa pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan saat ini hingga masa depan. Selanjutnya (Chafid & Muhammad, 2019) juga menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan ini diharapkan memperhatikan lingkungan dalam pembangunannya, pemberdayaan masyarakat lokal, budaya lokal yang semakin berkembang, dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi tumbuh.

Pembangunan pariwisata yang dilakukan di Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke tentunya harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Sebab dapat mengancam kelestarian ekosistem alam yang ada. Misalnya saja perluasan sarana jembatan untuk pengunjung wisata yang mesti menebang banyak pohon-pohon mangrove. Dengan luasnya sarana jembatan pengunjung, maka jumlah volume pengunjung pun akan meningkat sehingga ancaman baru pun akan datang berkaitan dengan sampah-sampah pengunjung yang berserakan di area Hutan Mangrove yang tentunya akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan berperan untuk mengatasi agar hal tersebut bisa teratasi. Selain itu, peran dari partisipasi masyarakat lokal juga sangat diperlukan. Baik itu dalam pelestarian lingkungan maupun pada aktivitas kepariwisataan.

Untuk mencapai keselarasan dalam pembangunan kepariwisataan, tentunya dapat juga dilihat dari keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh (Anindya Putri Raflesia Arifin, 2017, hal.13) bahwa konsep pengembangan suatu destinasi wisata dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunan. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat lokal, maka diharapkan memberikan dampak baik untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dan daerah. Meski pun pada

kenyataannya, jika diamati masih minimnya keterlibatan masyarakat lokal untuk berkontribusi pada kawasan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke.

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata tentunya mengharapkan adanya peningkatan perekonomian daerah, selain itu juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar wilayah objek wisata. Untuk itu, sasaran pengembangan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah yaitu menciptakan peluang untuk masyarakat sekitar terlibat dalam aktivitas kepariwisataan sehingga peluang kesempatan kerja pun terbuka lebar. Namun pada kenyataannya, masyarakat sekitar belum sepenuhnya terlibat dalam aktivitas kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya aktivitas UMKM, atraksi kesenian, dan pemandu wisata pada destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Tentu dengan kurangnya aktivitas-aktivitas kepariwisataan tersebut, maka akan mempengaruhi nilai jual pemasaran dan promosi menjadi sulit dikembangkan. Padahal dengan adanya pemasaran dan promosi yang terarah dan tepat sasaran maka akan menambah daya tarik wisata di Hutan Mangrove Tongke-Tongke.

Sasaran berikutnya dalam pengembangan kepariwisataan yaitu membangun kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur pariwisata, menciptakan regulasi yang mendukung, serta mempromosikan destinasi wisata baik di tingkat

lokal maupun internasional. Pemerintah, melalui kebijakan dan regulasinya, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di sektor pariwisata. Di sisi lain, masyarakat lokal juga memegang peranan kunci dalam pengembangan pariwisata. Selain berfungsi sebagai tuan rumah bagi para wisatawan, masyarakat juga dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi pariwisata, seperti usaha kecil menengah (UKM) di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan jasa pemandu wisata. Partisipasi masyarakat tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan pariwisata berlangsung dengan baik.

Berdasarkan observasi awal di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa perlunya pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dikarenakan sampai saat ini masih dijumpai permasalahan-permasalahan yang belum teratasi, sehingga dalam proses implementasinya diperlukan suatu analisis dengan rinci dan jelas. Dalam proses meneliti dan mengkaji dilakukan dengan menggunakan teori implementasi dari George C Edward III, alasannya karena dalam teori ini mengajukan empat indikator yang menentukan proses berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dilaksanakan. Ada pun empat indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga dengan begitu membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dilihat permasalahan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai, yaitu :

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimana faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan permasalahan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang di uraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

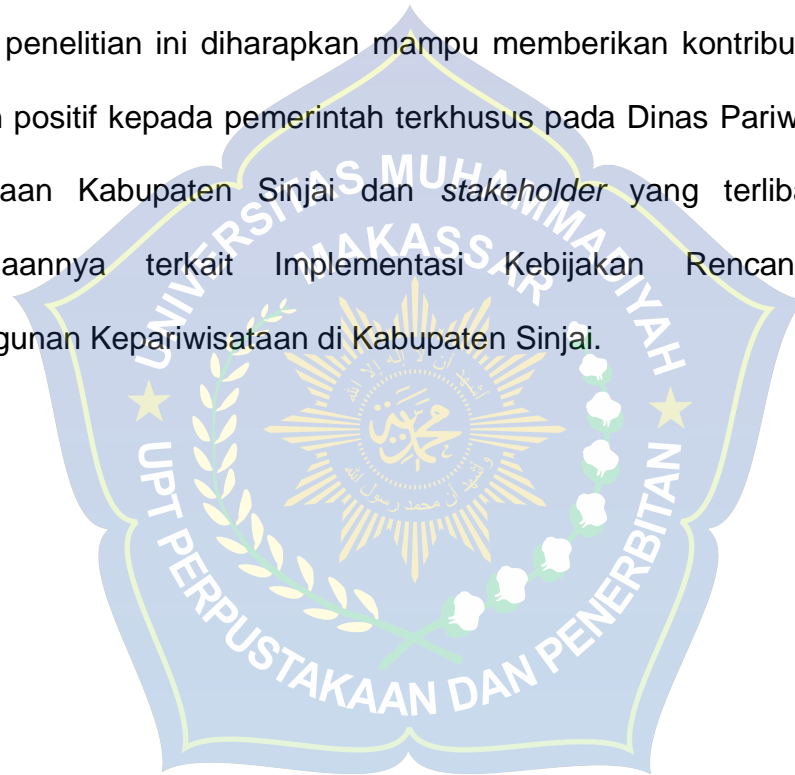
1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi civitas akademik mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam rangka pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam fokus Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan positif kepada pemerintah terkhusus pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaannya terkait Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari kebaruan atau pembeda yang dijadikan acuan penelitian selanjutnya. Ada pun dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya terfokus pada beberapa indikator penelitian seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, kemudian promosi objek pariwisata. Namun pada penelitian kali ini mencakup pada pelestarian lingkungan, keunggulan objek wisata, dan pengembangan objek wisata. Berikut merupakan rincian penelitian terdahulu sesuai dengan tema yang akan dikaji :

Tabel 1.1. Tinjauan Hasil Penelitian

No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Relevansi	
					Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Faisol Al Faruqi, 2023, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata - Pengembangan pemasaran wisata dalam bentuk promosi - Pemberdayaan masyarakat - Faktor pendukung dan penghambat pembangunan wisata 	Kualitatif deskriptif	Pembangunan pariwisata sudah dilakukan sejak awal hanya saja belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya fasilitas yang ada, juga terdapat beberapa fasilitas telah mengalami kerusakan. Kemudian pengembangan promosi juga telah dilakukan melalui website, medsos, media cetak dan brosur. Selain	<ul style="list-style-type: none"> - Objek diteliti yaitu Pariwisata - Jenis dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitian sebelumnya fasilitas, infrastruktur, dan promosi. Sekarang yang diteliti tentang lapangan pekerjaan. - Lokasi sebelumnya di Kabupaten Bondowoso, sekarang di Kabupaten Sinjai

				itu, masyarakat juga telah dilibatkan dalam mengelola pariwisata seperti menjadi tukang parkir, tukang karcis, petugas kebersihan, dan menjadi pelaku usaha UMKM di lokasi wisata. Faktor pendukung yakni memperbaiki pembangunan, upgrading promosi wisata dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan faktor penghambat yakni akses jalan yang jauh dari pusat kota dan keterbatasan anggaran.		
2.	Ridwan Mahardhika, 2017, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 - 2025 (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur - sarana kebersihan, sarana informasi dan sumber daya manusia - Teori yang digunakan George Edward III. 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi 	Kualitatif Deskriptif	Bahwa pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal sebab masih didapati akses jalan menuju objek wisata rusak parah. Kemudian, sarana kebersihan juga belum maksimal sebab belum tersedianya tempat pembuangan sampah di lokasi wisata. Selain itu sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Objek diteliti yaitu Pariwisata - Jenis dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif - Teori yang digunakan George Edward III 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitian sebelumnya infrastruktur, sarana dan sumber daya manusia. Sekarang yang diteliti tentang lapangan pekerjaan. - Lokasi sebelumnya di Kabupaten Pandeglang, Sekarang di Kabupaten Sinjai

	Asnawi Caringi Kecamatan Labuan Dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)			informasi pun juga belum tersedia ditandai dengan sulitnya para pengunjung mendapatkan informasi tentang kondisi objek wisata. Selanjutnya sumber daya manusia pun belum memadai.		
3.	Ersanda Praptining Sela, 2018, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pulau Merah)	Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi.	Kualitatif Deskriptif	Tata kelola wisata pulau merah belum memenuhi fungsi keorganisasian secara keseluruhan, namun sebagai organisasi yang mengelola kegiatan pariwisata berbasis masyarakat sudah berjalan dengan baik. Kemudian jika ditinjau berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Edward III, maka Komunikasi antara stakeholder sudah cukup bagus. Hal ini ditunjang karena sudah adanya perjanjian kerjasama. Sumber Daya dalam pengelolaan wisata telah	- Objek diteliti yaitu Pariwisata - Jenis dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif - Teori yang digunakan George Edward III	- Subjek penelitian sebelumnya tentang pengelolaan pariwisata. Sekarang yang diteliti tentang lapangan pekerjaan. - Lokasi sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, sekarang di Kabupaten Sinjai

				<p>dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan memberikan Diklat.</p> <p>- Disposisi, pembagian peran dan pembagian aset dalam wisata pulau merah sudah baik dan jelas karena tercantum di dalam perjanjian.</p> <p>- Struktur Birokrasi, pengendalian dalam pengelolaan pulau merah dilakukan oleh tiga pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat Desa Sumberagung dan Perhutani. Sehingga secara keseluruhan telah berjalan cukup baik.</p>		
4.	<p>Ade Nurmaini, 2022, Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan</p>	<p>- Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan</p> <p>- Proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan</p> <p>- Tahapan dari perencanaan kebijakan</p> <p>- Target yang ingin dicapai</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>Komunikasi telah dilakukan kepada stakeholder meski belum memberikan hasil yg sesuai akibat sebagian warga tidak memberikan sebagian tanahnya untuk pengembangan wisata. Kemudian proses</p>	<p>- Objek diteliti yaitu Pariwisata</p> <p>- Jenis dan metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif</p> <p>- Teori yang digunakan George Edward III</p>	<p>- Subjek penelitian sebelumnya sarana, prasarana, komunikasi, pelaksanaan kebijakan, rencana kebijakan dan target kebijakan. Sekarang yang diteliti tentang lapangan pekerjaan.</p>

				<p>pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan namun belum maksimal akibat pelaksanaan kebijakan tersebut masih tidak sesuai dengan SOP. Selain itu proses pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal karena pihak pemerintah daerah masih menemukan adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya dalam hal pencapaian target dalam kebijakan tersebut pihak Dinas Pariwisata belum dapat memenuhi sarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh pengunjung pada objek wisata tersebut, dimana masih banyak ditemukan sarana dan</p>	<p>- Sebelumnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekarang di Kabupaten Sinjai</p>
--	--	--	--	---	--

				fasilitas umum yang belum tersedia pada objek wisata tersebut.		
5.	Jeklin F. Purba, Agustinus B. Pati, Franky R.D. Rengkung ,2022, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun Dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba	Menggunakan teori Edward III dengan indikator : Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi.	Kualitatif	<p>Komunikasi telah di laksanakan, namun masih ada kendala terhadap keterbatasan sosialisasi langsung ke masyarakat.</p> <p>Sumber Daya belum optimal dalam pelaksanaannya karena masyarakat hanya mengelola masih dengan seadanya.</p> <p>Struktur Birokrasi semua kalangan ikut berperan dalam struktur birokrasi ini baik dari pusat dan daerah saling berkordinasi.</p> <p>Disposisi pengembangan pariwisata masih kurang perhatian oleh Pemerintah. Karena belum maksimalnya pengelolaan sehingga pariwisata Danau Toba bisa dikatakan wisata yang belum produktif.</p>	Objek diteliti yaitu Pariwisata Jenis dan metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dan Teori yang digunakan George Edward III	<p>Subjek penelitian sebelumnya tentang pengelolaan pengembangan wisata, Sekarang yang diteliti tentang lapangan pekerjaan.</p> <p>Lokasi Sebelumnya di Kabupaten Simalungun, sekarang di Kabupaten Sinjai</p>

B. Tinjauan Konsep dan Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan negara atau pemerintah yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Bella Novitasari, Bandiyah, 2014). Selain itu kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan (Pramono, 2020, hal.32).

Sementara itu, menurut (Taufiqurakhman, 2014, hal.49) kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan atau masalah yang ada dalam masyarakat (Yuliana, 2022, hal. 98). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan otoritas pemerintah dalam menangani suatu masalah tertentu yang bertujuan untuk mengatur bersama (Maulana & Nugroho, 2019, hal.3). Ada pun pandangan lain

tentang kebijakan publik ialah segala suatu urusan yang dijalankan oleh pemerintah guna menyelesaikan beragam masalah yang ada dalam masyarakat serta untuk menggapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya (Nur R et al., 2022, hal.6). Ada pun penjelasan lain tentang kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu. Melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dalam suatu kebijakan tertentu (Suandi, et al., 2022, hal.166).

Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone dalam (Nur & Guntur, 2019, hal.7), Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Ada pun penjelasan lain juga bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha (Mustari, 2015, hal.1). Berdasarkan beberapa pendapat yang lain maka kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan

sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017, hal.3).

b. Proses Kebijakan Publik

Kajian Analisis Kebijakan, diantaranya oleh William N. Dunn dalam (Subianto, 2020, hal.4) bahwa analisis kebijakan merupakan proses intelektual dan praktis yang bertujuan menciptakan, secara kritis menilai serta mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan setidaknya ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang semakin kompleks. Adapun proses analisis kebijakan meliputi: merumuskan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual, William N. Dunn dalam (Taufiqurakhman, 2014, hal.16). Ada pun tahapan dalam proses pembuatan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Sementara itu, Howlet dan M. Ramesh dalam (Kadji, 2015, hal.15) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dengan demikian, proses kebijakan publik tidak terlepas dari rangkaian kegiatan yang mempertimbangkan dimensi input, proses, output, dan outcome melalui tahapan proses formulasi, implementasi, maupun evaluasi dari kebijakan publik itu sendiri.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial pada suatu proses kebijakan, dimana kegiatannya berupa segala tindakan dari implementor kebijakan untuk menjalankan kebijakan/program yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, karena pada tahap ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu kebijakan (Nur R et al., 2022, hal.6). Untuk memahami proses kebijakan diperlukan juga analisis mengenai implementasi kebijakan (Strehlenert et al., 2015, hal.2). Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri (Pramono, 2020, hal.4).

Pentingnya implementasi kebijakan, dilandasi beberapa alasan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan (Tresiana, Novita, 2021, hal.11). Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi (Mustari, 2015, hal.189). Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan (Desrinelti et al., 2021, hal.85). Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan (Kadji, 2015, hal.47).

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran/publik, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang bersifat negatif maupun positif (Abdoellah & Rusfiana, 2016, hal.61). Selain itu untuk mencapai keberhasilan *outcome* kebijakan tidak hanya bergantung pada pengembangan sistem yang efektif tetapi juga bergantung pada

pengelolaan dari implementasi kebijakan tersebut (Khan & Khandaker, 2016, hal.541).

b. Model Keberhasilan Implementasi Kebijakan

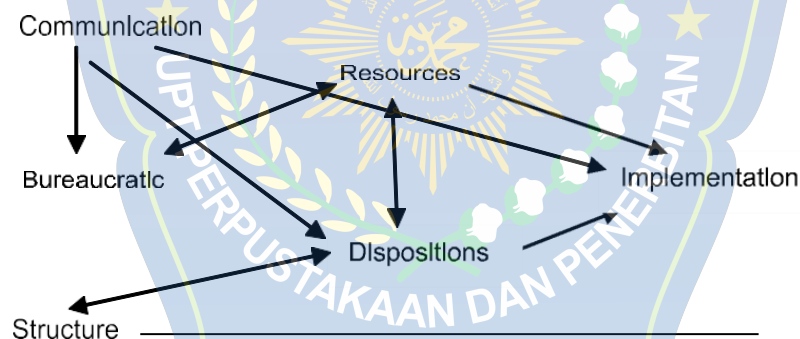
Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan baik di level nasional maupun level daerah (Sinaga et al., 2021, hal.80). Kebijakan dapat dikatakan berhasil dengan baik ditentukan oleh sumber daya manusia, institusi, dan organisasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan rekayasa ulang (Herawati, 2021, hal.488). Pentingnya peranan implementasi dalam suatu proses kebijakan untuk menciptakan suatu perubahan atau keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga perubahan atau keadaan yang diinginkan itu terwujud. Maka menjadi keharusan untuk mengidentifikasi secara cermat, mengetahui dan memahami dengan baik dan benar faktor-faktor yang kiranya bisa menjadi penyebab gagal atau tidak berhasilnya suatu kebijakan publik diimplementasikan dengan baik. Sampai di sini, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (Sutmasa, 2021, hal.29).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan saling berhubungan satu sama lain. Ada pun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, diantaranya :

1) George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang dianggap berkontribusi pada implementasi kebijakan. yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing aspek berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016, hal.100).

Gambar 1.1 Faktor Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III

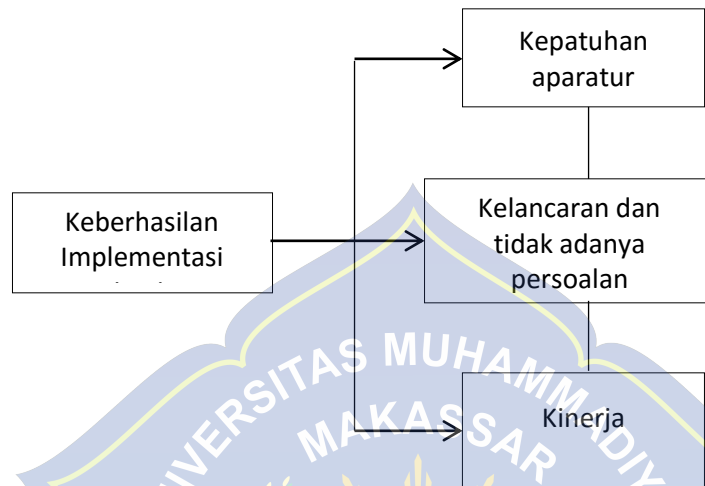


Sumber : Edward III (Mustari, 2015)

2) Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan Franklin bahwa : “Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor: a) perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana, b) keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan c) implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program”, yang dapat digambarkan berikut ini.

Gambar 1.2 Faktor keberhasilan Implementasi Menurut Rippley dan Franklin



Sumber : Rippley dan Franklin (Yulianto, 2015)

3) Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Mustari, 2015, hal.152) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

a) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

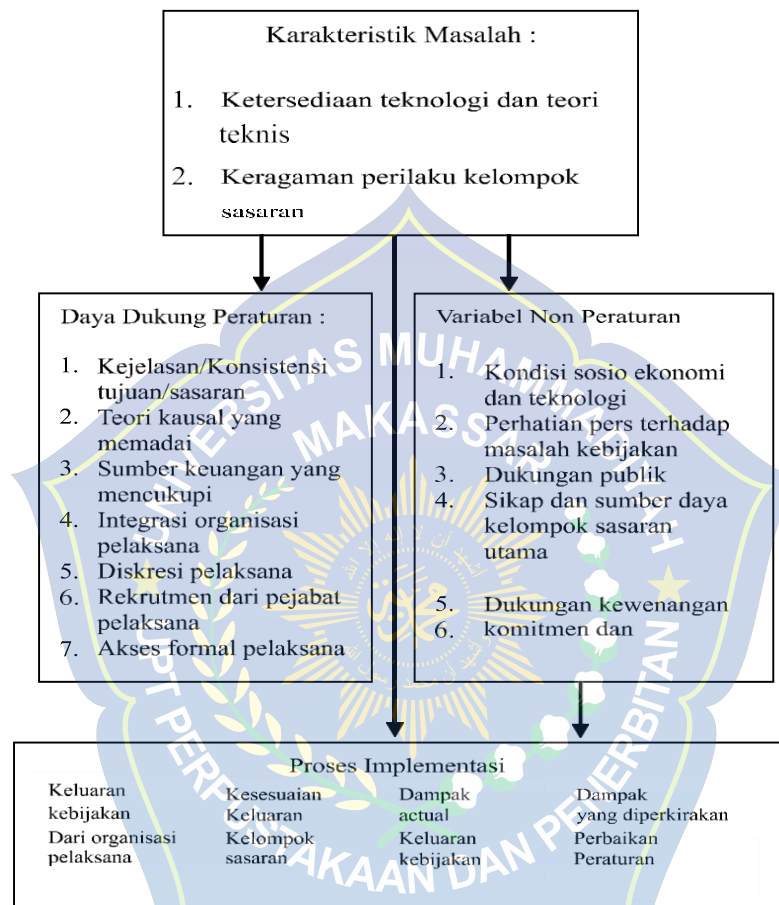
b) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c) Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 2.1 Faktor keberhasilan Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier



Sumber : Mazmanian dan Sabatier (Mustari, 2015)

3. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Menurut UU No. 10 tahun 2009 pengertian pariwisata lebih mengacu kepada beragam kegiatan wisata yang menggunakan serangkaian jasa atau pelayanan dan disediakan oleh *stakeholder* atau pengambil kebijakan meliputi pemerintah pusat, pemda, pengusaha, masyarakat lokal dan pekerja ekonomi kreatif (Srisusilawati et al., 2022, hal.24). Sedangkan menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata “Pari” dan kata “Wisata”.

Kata *Pari* berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata *wisata* berarti perjalanan (Utama, 2014, hal.21). Ada pun pandangan lain datang dari (Wirawan & Semara, 2021, hal.6), bahwa pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Pradana, 2019, hal.1) yaitu secara etimologis, pariwisata terdiri dari kata '*wisata*' yang berarti perjalanan (*traveling*); kata *wisatawan* yaitu orang yang melakukan perjalanan (*traveler*), dan *kepariwisataan* yaitu kegiatan atau segala sesuatu sehubungan dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata membawa pengaruh sosial, ekonomi dan kebudayaan yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata.

Sigijama dalam (Tangian et al., 2020, hal.8) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah rangkaian aktivitas, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan

seseorang/sekelompok orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan tujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Tangian et al., 2020, hal.7).

b. Kepariwisata (*Tourism*)

Kepariwisata adalah suatu gejala yang terjadi karena diakibatkan oleh pergerakan manusia dari tempat tinggalnya untuk melakukan suatu kegiatan wisata, baik liburan atau bisnis sampai ia kembali ke tempat tinggal semula (Wirawan & Semara, 2021, hal.7). Secara lebih luas (Sunaryo, 2013, hal.2) didalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, juga dijelaskan mengenai pengertian kepariwisataan, yang diberikan batasan pengertian atau definisi sebagai : keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

c. Dasar Pengembangan Kepariwisata

Nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan

wawasan nusantara, karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- 2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- 4) Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia serta dapat didayagunakan secara optimal, dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan. Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut harus senantiasa ditingkatkan (Kurniawati, 2013, hal.5).

4. Pembangunan Pariwisata

a. Konsep Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan konsep yang sedang berkembang, namun perjalanan menuju tujuan sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial-budaya dan kesejahteraan (Utama, 2014, hal.174). Sedangkan dalam (Kurniawati, 2013, hal.2), menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan

kepariwisataan tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2) Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Jadi disimpulkan, Pembangunan Pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana- prasarana, objek daya tarik wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

b. Tujuan dan Faktor yang Berperan Dalam Pembangunan Pariwisata

1) Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b) Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;

c) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan

d) Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

2) Tiga faktor yang sangat berperan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia yaitu:

a) Sumber Daya Alam

Telah diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beranekan ragam dan mempunyai unsur-unsur keindahan alam (*natural beauty*), keaslian (*originality*), kelangkaan (*scarcity*), dan keutuhan (*wholeness*) dan diperkaya dengan kekayaan alam berupa keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem, serta gejala alam yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata di Indonesia.

b) Penduduk

Penduduk Indonesia yang beradat dan ramah tamah, terdiri atas beberapa suku bangsa dengan keanekaragaman budaya yang sangat berpengaruh bagi upaya pembangunan nasional yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

c) Geografi

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17.508 pulau yang mencakup wilayah yang luasnya lebih dari 1,9 juta km² dan dua pertiganya merupakan wilayah perairan dan memiliki garis pantai lebih 81.000 km. Posisi Indonesia yang sangat strategis merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh bagi pembangunan bangsa dan Negara. Kondisi geografis yang demikian memberikan peluang yang besar bagi upaya pembangunan pariwisata.

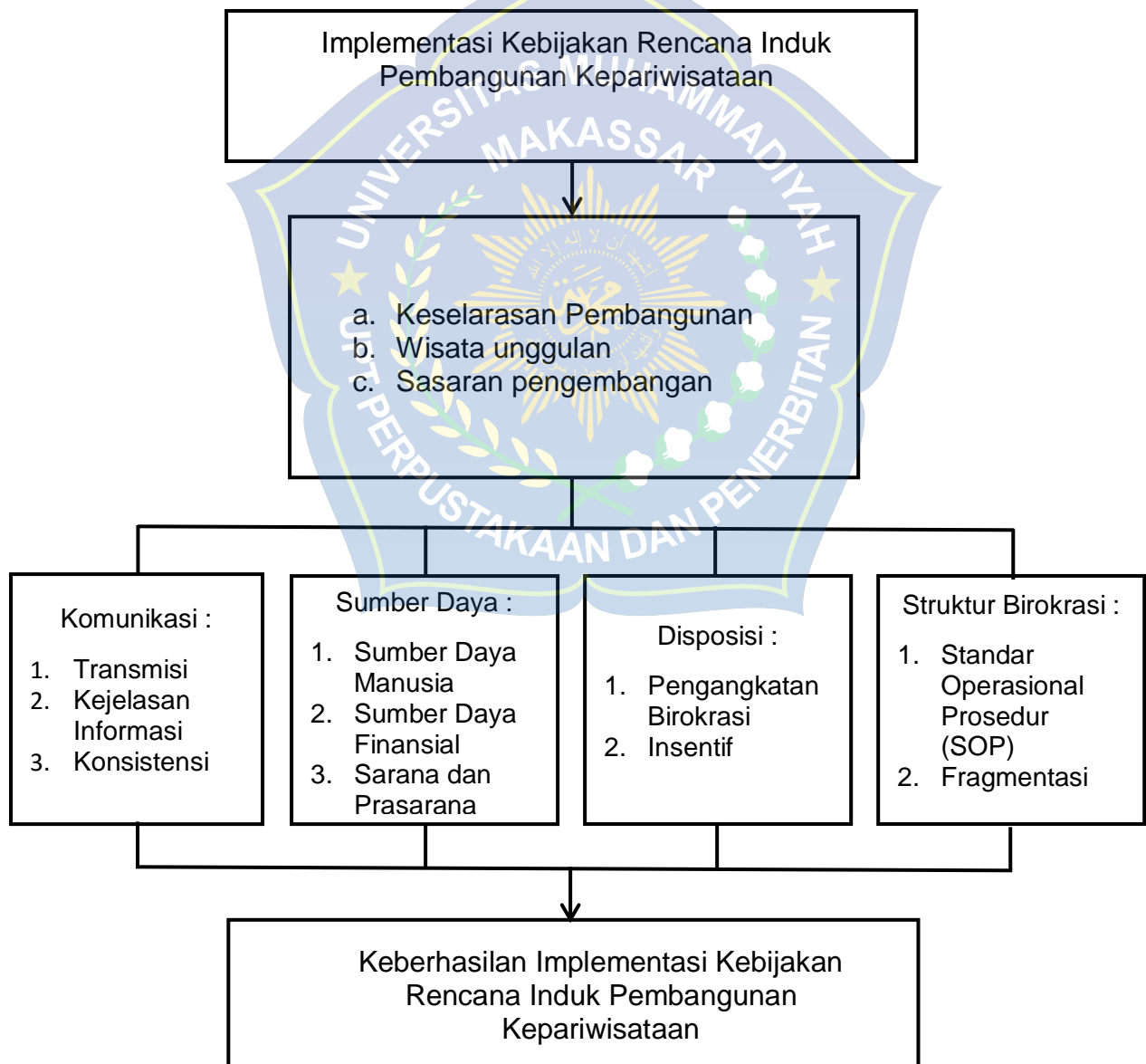
Melalui, pembangunan pariwisata yang komprehensif dan integral dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan kondisi geografis, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan mampu mendorong terciptanya ketahanan nasional yang tangguh (Kurniawati, 2013, hal.10).

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penjelasan alur pikir penelitian ini diharapkan bahwa Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Sinjai bertujuan untuk bisa mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata.

Berikut akan di uraikan kerangka pikir dalam penelitian yang mendukung terjadinya implementasi kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah di uraikan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai tentang keselarasan pembangunan, wisata unggulan, dan sasaran pengembangan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah dengan menggunakan teori dari George C. Edward III.

E. Deskripsi Fokus

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, dapat diketahui deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Keselarasan Pembangunan

Pembangunan pariwisata harus memperhatikan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek pelestarian lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan pengelolaan dampak negatif wisata.

2. Wisata Unggulan

Wisata unggulan merupakan destinasi wisata yang memiliki daya tarik utama disuatu daerah karena memiliki keunikan atau keindahan yang berbeda. Wisata ini biasanya menjadi ikon dalam industri pariwisata daerah dan juga sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar.

3. Sasaran Pengembangan

Sasaran pengembangan pariwisata mencakup tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan dampak positif pariwisata terhadap ekonomi dan masyarakat lokal dan tentunya perluasan lapangan kerja.

Selanjutnya deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu yang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan menurut Edward III sebagai berikut :

1. Komunikasi.

- a. Transmisi yaitu penyampaian informasi yang baik, agar kebijakan tidak hanya disampaikan kepada para implemantor akan tetapi bisa diterima oleh kelompok sasaran.
- b. Kejelasan informasi yaitu setelah kebijakan di transmisikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas maka masing-masing mengetahui apa maksud, tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan sehingga diketahui apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan kebijakan agar efektif.
- c. Konsistensi yaitu agar kebijakan tidak berubah-ubah, jika kebijakan tidak konsisten yang maka dapat membingungkan pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak optimal.

2. Sumber Daya

- a. Sumber daya manusia yaitu pelaksana dari sebuah kebijakan yang memadai dan kompeten sesuai dengan bidang yang diperlukan.

- b. Sumber daya finansial yaitu unsur paling penting berupa dana untuk memenuhi semua kebutuhan kebijakan agar dapat terimplementasikan sesuai dengan tujuan.
- c. Sarana dan prasarana yaitu unsur sumber daya yang bersifat fisik seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kebijakan.

3. Disposisi

- a. Pengangkatan birokrasi yaitu saat pemilihan dan pengangkatan pegawai pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi dan hasrat yang kuat serta komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan pengawasan yang diharapkan, terutama untuk kepentingan masyarakat.
- b. Insentif yaitu memberikan insentif berupa penambahan keuntungan atau biaya untuk para pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

- a. Standar operasional prosedur (SOP) yaitu struktur paling dasar dalam sebuah organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dan digunakan pegawai atau para pelaksana kebijakan sebagai dasar kegiatan sehari-hari.
- b. Fragmentasi yaitu Penyebaran tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dengan melibatkan organisasi luar tanpa adanya tumpang-tindih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif ini mampu mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan dengan yang terjadi di lapangan, sebagai bahan kajian untuk menentukan kekurangan dan kelemahan sehingga ditentukan upaya penyempurnaan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui variabel-variabel, hambatan serta upaya untuk mengetahui kebijakan dalam implementasi pembangunan kepariwisataan.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata tertulis, lisan atau gambar dari pada angka-angka tentang masalah yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan (memaparkan) peristiwa yang terjadi pada masa kini. Deskripsi peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis yang menekankan pada pengungkapan data berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan (Winarno, 2013, hal.56).

Proses penelitian ini menyangkut fakta permasalahan yang ada dilapangan dan mampu menafsirkan data berbentuk kata dan kalimat mengenai “Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai”.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober s/d 23 Desember 2024. Penelitian yang dilakukan beralokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman atas Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dan maksimal dengan apa yang ingin dicapai atau malah sebaliknya.

C. Informan Penelitian

Informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang mampu memberikan informasi yang memadai (*key person*) tentang “Implementasi Kebijakan dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai”. Ada pun informan yang dianggap bisa memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
- d. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Masyarakat
- f. Pengunjung

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi tiga kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan proses tanya-jawab kepada narasumber untuk menghasilkan data akurat secara langsung. Selain itu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiono, 2020, hal.195).

2. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian secara mendalam untuk memperoleh data yang diinginkan sebagai data pendukung atau pembanding dari data wawancara. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial yang akan diteliti. Observasi juga bertalian dengan upaya-upaya untuk merumuskan masalah dan membandingkannya dengan kenyataan dengan yang terjadi dilapangan (Alaslan, 2021, hal.74).

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk visual atau tulisan resmi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun dokumen lainnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti, Sugiono dalam (Alaslan, 2021, hal.79).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik pengolahan data dan analisa yang dilakukan secara bersamaan pada proses penelitian. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lokasi, selama dilokasi, dan setelah dilokasi.

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori (Matthew B. Miles, 2014) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Dalam kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menstransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian.

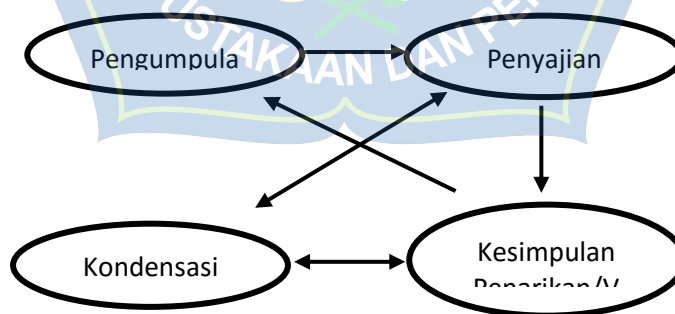
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel dan bagan yang menggambarkan analisis pada transktivitas dan konteks sosial teks yang dirancang untuk menghubungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dicari.

3. Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi (*Conclusion, Drawing/Verification*)

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transktivitas, hubungan unsur transktivitas dengan konteks sosial. Setelah disimpulkan analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.

Gambar 2.2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana)

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menguji kredibilitas data untuk mendapatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pengujian dan keabsahan data penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yakni :

1. Triagulasi

Triagulasi adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, *triagulasi* teknik pengumpulan data dan waktu.

2. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh penelitian kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pada penelitian ini membercheck akan dilakukan setelah pengambilan data selesai atau setelah penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan dengan memiliki posisi strategis yang merupakan iklim vegetasi tropis sampai pada posisi strategis pesisir pantai yang membuat Kabupaten Sinjai penuh dengan berbagai panorama alam seperti gunung, pantai dan jajaran beberapa pulau-pulau yang memiliki penghuni dan juga tidak berpenghuni. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2' 56" - 50 21' 16" Lintang Selatan (LS) dan antara 1190 56' 30" - 1200 25' 33" Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota

Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



B. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan acuan dasar pelaksanaan pembangunan pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Pembangunan pariwisata yang dilaksanakan perlu dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan aspek lingkungan hidup, peningkatan perekonomian masyarakat, menciptakan wisata unggulan, perluasan lapangan kerja, dan pengembangan objek wisata. Beberapa hal tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan.

1. Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilaksanakan, maka berikut uraiannya :

a. Keselarasan Pembangunan

Keselarasan pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang dilakukan pada objek wisata hutan mangrove tongke-tongke dengan memperhatikan dan menjaga aspek lingkungan hidup yang ada disekitar objek wisata agar tidak ada kerusakan yang terjadi. Melihat kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke termasuk dalam objek wisata alamiah sehingga perlu dijaga kelestariannya. Adapun luas yang dimiliki dari kawasan lindung hutan mangrove yaitu 173,5 ha dengan luas kawasan yang digunakan sebagai kawasan objek wisata yaitu 78,00 ha. Berdasarkan yang terjadi dilapangan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan pembangunan pariwisata telah berupaya untuk tetap menjaga kelestarian objek wisata hutan mangrove tongke-tongke. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan. Ada pun hasil wawancara yang diperoleh dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

“Untuk di hutan mangrove tongke-tongke itu sudah beberapa kali dilakukan pengembangan disana. Dibangun jembatan diperluas, dibuatkan menara pandang juga. Makanya pembangunan ini dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk lingkungan hidup

sudah pasti diperhatikan. Jadi ada beberapa pohon memang yang ditebang untuk perluasan jembatan, tapi setelahnya dilakukan lagi penanaman kembali jadi hutannya terjaga. Upaya lain juga yang dilakukan kita menguji kadar airnya disana apakah tercemar atau tidak. Dan hasilnya masih baik.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Informan TB menjelaskan bahwa implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya penanaman pohon kembali jika ada kerusakan hutan dan juga melakukan pemeriksaan kadar air. Hal tersebut dilakukan guna menjaga ekosistem lingkungan di kawasan objek wisata.

Informan TB juga mempertegas dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Sebagai pelaksana kebijakan disektor pariwisata, peran kita sangatlah besar. Kita yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga objek wisata disana semenjak hutan mangrove dijadikan sebagai objek wisata. Jadi apa pun pembangunan yang dilakukan pasti memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kita juga mengedukasi masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian hutan mangrove dengan tidak melakukan penebangan pohon.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dalam pernyataan tersebut dipertegas bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kebijakan disektor pariwisata memiliki peran yang besar dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan objek wisata dengan baik dan benar sehingga kelestarian objek wisata bisa tetap

terjaga. Upaya pelestarian juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut bekerja sama menjaga hutan mangrove dari kerusakan akibat penebangan hutan mangrove.

Selain pernyataan diatas, terdapat juga pernyataan lain dari informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. uraian pernyataannya sebagai berikut :

“Kebijakan ini sudah dijalankan oleh kami dengan memperhatikan dan menjaga lingkungan objek wisata yang ada. Dan untuk objek wisata hutan mangrove tongke-tongke selalu dilakukan reboisasi disana. Ada juga beberapa tempat sampah yang disediakan untuk menjaga supaya tetap bersih. Melakukan uji udara juga untuk masalah pencemaran udara, kita lakukan pemeriksaan air apakah ada pencemaran atau tidak. Jadi kita rutin melakukan pemeriksaan udara dan air untuk objek wisata disana itu dan ini sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah.”
(Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan sudah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan dan menjaga lingkungan objek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Upaya yang dilakukan yaitu reboisasi atau penanaman pohon, kemudian menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menjaga kebersihan, dan juga dilakukan pemeriksaan kadar air dan hasilnya tidak ditemukan adanya pencemaran. Berikut ditampilkan sampel hasil uji yang dilakukan :

Gambar 3.2 Laporan Hasil Uji

TESTING LABORATORY
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis, Depok 16453 - Indonesia
Phone : (62-21) 8740202 Fax : (62-21) 8718098 - 48
E-mail: info@mutuagunglestari.com website: www.mutuagunglestari.com

LAPORAN HASIL UJI
REPORT OF TESTING

Nomor Seri : 0472 / SL / XI / 23
Serial Number

Jenis Contoh : Air Laut
Sample Type

Tempat Pengujian : Mutu International / PT Mutuagung Lestari Tbk
Testing Place
Laboratorium Lingkungan

Untuk Analisis : Fisika, Kimia dan Biologi
Tested for

Deskripsi / Kondisi Contoh : Jernih, berpartikel, bersih, dikemas dalam jerigen plastik dengan volume
Description / Condition of Sample : ± 2000 mL dan botol kaca steril

Nama, Alamat, Kontak Pelanggan : DINAS PARIWISATA KABUPATEN SINJAI
Name, Address, and Customer Name : Jl. Jenderal Sudirman, Balaripa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
Sulawesi Selatan

Lokasi Pengambilan Contoh : Tongke-tongke
Sampling Location

Posisi Geografi : S : 5° 8' 57.354"
Geographical Position : E : 120° 16' 23.0952"

Pengambilan Contoh Oleh : PT Mutuagung Lestari Tbk
Sampling By

Metode Pengambilan Contoh : SNI 6964.8 - 2015
Method of Sampling

Tanggal (Waktu) Pengambilan Contoh : 11 November 2023
Date (Time) of Sampling

Kondisi Lingkungan Pada Saat Sampling : Normal / Cerah
Environmental Condition, During Sampling

Tanggal Penerimaan Contoh : 11 November 2023
Date of Receipt (Institute)

Tanggal Pelaksanaan Analisis : 20 November 2023
Date of Analysis (Laboratory)

Halaman 1 dari 2
Page of
Dibuatkan Tanggal, 28 November 2023
Date of Issue

PT Mutuagung Lestari Tbk
FITRIYATI YUSTIKAWATI
Manager Teknis
Laboratorium Lingkungan

UJL-40030/1 5/61002023

This Report may not be reproduced Except in full, without written approval of PT Mutuagung Lestari Tbk.
The testing result observe the condition only at the time of sampling.
UJL-40030/1 5/61002023

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
TEST RESULT

Nomor Seri : 0472 / SL / XI / 23
Serial Number

Halaman 2 dari 2
Page of

No	Parameter	Satuan	Hasil	Buku Mutu ¹⁾	Metoda Analisis/Aliat
1	Viskositas	Pt. Co	14.7	-	SNI 6988.60-2011
2	Kekeruhan	m	-	>3	UJI - LL 119 (Sachit Disk)
3	Kekeluhan	NTU	0.27	-	UJI - LL 099 (Nephelometer)
4	Kabauhan	-	Tidak Berbau	tidak berbau	UJI - LL 100 (Organoleptik)
5	Padaan Tersuspensi Total	mg/L	5.0	80	UJI - LL 101 (Gravimetri)
6	Sempah ²⁾	-	Nihil	Nihil	Visual
7	Suhu (Terdik)	°C	30.1	Alarm ³⁾	UJI - LL 088 (Thermometer)
8	Lapuan Minyak ⁴⁾	-	Nihil	Nihil	Visual
9	pH (Instal)	-	8.27	6.5 - 8.5	UJI - LL 102 (pH meter)
10	Salinitas	‰	28.1	Alarm ³⁾	UJI - LL 106 (Thermist)
11	Oksigen terlarut (DO, dissolved oxygen)	mg/L	4.65	-	UJI - LL 103 (DO Meter)
12	BOD ₅ (Kebutuhan Oksigen Biokimia, KOB ₅) ⁵⁾	mg/L	3.05	-	SNI 6988.72-2009
13	Amonia Total (NH ₄ -N)	mg/L	<0.0037	0.3	SNI 19-8964.3-2003
14	Ordnofat (PO ₄ -P)	mg/L	0.052	-	UJI - LL 118 (Spektrofotometri)
15	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	<0.0032	-	SNI 19-8964.7-2003
16	Sulfida (S ₂ -S)	mg/L	<0.0020	-	SNI 19-8964.8-2003
17	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	<0.0020	0.03	SNI 19-8964.4-2003
18	Senyawa Fenol Total ⁶⁾	mg/L	<0.0010	0.002	UJI - LL 107 (Spektrofotometri)
19	Sulfonat (sebagai) sebagai KBA ⁵⁾	mg/L	0.59	1	UJI - LL 108 (Spektrofotometri)
20	Minyak dan Lemak ⁷⁾	mg/L	0.31	5	UJI - LL 201 (FTIR)
21	Paku (ng)	mg/L	0.0015	0.003	SNI 19-8964.3-2003
22	Klorofil ⁸⁾ (Klorofil (Cr(VI))) ⁹⁾	mg/L	<0.0020	-	UJI - LL 118 (Spektrofotometri)
23	Amon (Am)	mg/L	0.0016	-	UJI - LL 085 (AAS-VGA)
24	Kadmium (Cd)	mg/L	<0.00043	0.01	UJI - LL 088 (AAS)
25	Tembaga (Cu)	mg/L	<0.0020	0.05	UJI - LL 087 (AAS-Tungku Karbon)
26	Tinbat (Pb)	mg/L	0.0019	0.05	UJI - LL 087 (AAS-Tungku Karbon)
27	Seng (Zn)	mg/L	<0.0025	0.1	UJI - LL 081 (AAS)
28	Nikel (Ni)	mg/L	<0.0065	-	UJI - LL 082 (AAS)
29	Fecal Coliform ¹⁰⁾	mpn/100 mL	<1.8	-	SM 221 Edition 2017 Methods 9221-E
30	Coliform (Total) ¹¹⁾	mpn/100 mL	<1.8	1000	SM 221 Edition 2017 Methods 9221-E

Keterangan:
¹⁾ Buku Timbang
²⁾ PP 30 Mei 2022 Tahun 2021 Lampiran VII tentang Buku Mutu Air Laut untuk Pelabuhan
³⁾ Untuk suhu, diperlukan waktu pendirian sampai 2°C (atau dengan Cekas) dan suhu akan
⁴⁾ Untuk Sulfida, diperlukan waktu pendirian sampai 10 (lima puluh) menit sebelum digunakan
⁵⁾ Menggunakan Metode Titrasi (dari Pengujian yang Dapat dilakukan Berdasarkan Metode yang Digunakan)

Diperiksa Oleh:

 Agus Setia Nugraha
 Supervisor
 Laboratorium Lingkungan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan dari laporan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi parameter uji tidak ditemukan adanya pencemaran yang melebihi standar indikator.

Hal tersebut senada dengan pernyataan informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk aspek lingkungan hidup ya agar tetap terjaga dengan baik, disediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Ada juga petugas disana yang bertugas untuk membersihkan.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa upaya untuk menjaga aspek kelestarian lingkungan hidup, maka salah satunya dilakukan dengan menyediakan tempat sampah yang cukup sehingga area Hutan Mangrove Tongke-Tongke bisa terjaga kebersihannya dengan baik. Selain itu juga disediakan petugas-petugas kebersihan untuk membersihkan area objek wisata sebagai wujud perhatian terhadap kelestarian lingkungan.

Begitu pula dengan informan IM sebagai Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan pembangunan ini bisa dibilang sudah dijalankan dengan baik tapi belum maksimal karena anggaran terbatas. Tapi kalau untuk menjaga lingkungan sudah dimaksimalkan juga dengan anggaran yang ada. Kalau upaya yang pernah dilakukan, pernah penanaman pohon disana sama pengecekan kondisi air kalau tidak salah.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan IM juga mempertegas bahwa kebijakan pembangunan kepariwisataan sudah dijalankan dengan baik dan sesuai, meskipun dalam pelaksanaannya masih didapatkan kendala dalam hal keterbatasan anggaran. Meskipun demikian Dinas Pariwisata berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan anggaran yang tersedia. Ada pun upaya yang dilakukan yaitu berupa penanaman pohon atau reboisasi dan juga pengecekan kondisi air pada kawasan objek wisata.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam hal menjaga keselarasan

pembangunan lingkungan hidup di kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan penanaman pohon atau reboisasi, dan juga yang dilakukan adalah menyediakan petugas kebersihan dan pengadaan tempat sampah di lokasi objek wisata secara merata sehingga kebersihan di area objek wisata bisa terjaga. Selain itu, untuk mengetahui tingkat pencemaran lingkungan pada air maka dilakukan pengecekan kadar air secara rutin. Selanjutnya upaya lain yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu mengedukasi kepada masyarakat sekitar kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke untuk berperan aktif ikut menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga pembangunan pariwisata bisa berjalan dengan baik selaras dengan terjaganya lingkungan hidup yang ada di kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke.

b. Wisata Unggulan

Dalam pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan pembangunan pariwisata yang unggul. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam hal menciptakan wisata yang unggul maka suatu objek wisata harus memiliki daya tarik yang khas dan mampu menjadi ikon utama suatu daerah. Objek wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke memiliki keunggulan yang khas

yaitu memiliki luas 173,5 hektare dan menjadikannya sebagai hutan mangrove terluas dan terapat di Indonesia.

Oleh karena itu objek wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke telah menjadi ikon wisata di Kabupaten Sinjai dan oleh pemerintah daerah telah dijadikan sebagai objek wisata unggulan dikarenakan objek wisata tersebut selain memiliki keunikan dan keunggulan yang khas dari segi luas kawasan, hutan mangrove tongke-tongke juga mampu meraih pengunjung paling banyak dan menghasilkan pendapatan daerah terbanyak dibandingkan dari objek wisata lainnya di Kabupaten Sinjai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“Hutan mangrove itu wisata unggulannya Sinjai. Sehingga selalu diupayakan bagaimana caranya agar supaya pengunjung bisa selalu nyaman dan ramai datang ke sana. Beberapa waktu yang lalu ini sudah diadakan festival disana tujuannya untuk mempromosikan objek wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Kalau objek wisata semakin dikenal pasti pengunjung banyak yang datang. Dan alhamdulillah selama ini pengunjung disana selalu ramai tiap tahunnya sehingga pendapatan pun yang didapatkan juga meningkat.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Informan TB mengemukakan bahwa Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke telah dijadikan sebagai wisata unggulan di Kabupaten Sinjai. Sehingga untuk mempertahankan hal tersebut maka selalu diupayakan agar pengunjung yang datang selalu mengalami peningkatan. Ada pun upaya yang dilakukan yaitu melakukan promosi pariwisata dan juga diadakan kegiatan berupa festival wisata guna menarik pengunjung

sebanyak-banyaknya. Alhasil pengunjung yang berdatangan pun mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi yang diperoleh pemerintah daerah.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Uraian pernyataannya sebagai berikut :

“Untuk pengunjung disana dari data pernah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tapi beberapa tahun terakhir mengalami lagi penurunan. Jadi kita tidak capai target pengunjung yang datang ke sana. Tapi diantara objek wisata di Sinjai, disana yang paling banyak datang pengunjungnya. Karena sudah jadi ikon wisata unggulannya Sinjai itu Hutan Mangrove. Makanya untuk menjaga juga kenyamanannya pengunjung disana sudah disediakan beberapa fasilitas penunjang. Sudah pernah juga dibangun, diperluas jembatan yang ke sebelah kiri kalau masuk orang. Dibuatkan area spot foto juga yang ada tulisan hutan mangrovenya. Jadi diperluas agar supaya pengunjung bisa semakin leluasa untuk keliling.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jumlah pengunjung yang datang di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke mengalami peningkatan, hanya saja sejak beberapa tahun terakhir jumlah pengunjung mengalami penurunan. Meski demikian jika dibandingkan dengan objek wisata lain yang ada di Kabupaten Sinjai, Objek wisata hutan mangrove tongke-tongke yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak. Hal inilah menjadi alasan objek wisata tersebut dijadikan sebagai objek wisata unggulan. Sehingga untuk tetap menjaga kenyamanan para pengunjung yang datang maka disediakan beberapa

fasilitas penunjang. Dan untuk menambah kepuasan para pengunjung yang datang telah dibangun dan diperluas jembatan jalan dan juga area spot foto. Hal ini dilakukan agar para pengunjung yang datang bisa lebih puas berkeliling menikmati pemandangan Hutan Mangrove.

Hal senada juga disampaikan oleh informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, yang mengatakan bahwa :

“Pengunjungnya banyak. Tapi nanti lihat lagi datanya supaya lebih pasti tahun berapa. Yang jelas diantara objek-objek wisata yang ada, hutan mangrove yang paling banyak pengunjungnya tiap tahun bahkan sampai puluhan ribu yang datang ke sana. Makanya kalau diperhatikan memang hutan mangrove yang jadi tempat favorit untuk berwisata dan unggul dari yang lain.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengunjung yang datang di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke terbilang paling banyak jika dibandingkan dengan objek wisata lain yang ada di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, objek wisata hutan mangrove tongke-tongke yang dijadikan sebagai tempat wisata favorit dan unggul bagi masyarakat dan pemerintah untuk datang berwisata. Berikut ditampilkan jumlah wisatawan pada beberapa objek wisata kabupaten sinjai tahun 2019-2023 :

Tabel 2.1 Jumlah Wisatawan Objek Wisata Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023

No	Objek Wisata	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1.	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	13.345	7.718	9.827	9.969	7.766	48.625

2.	Air Terjun Lembang Saukang	330	74	335	273	230	1.242
3.	Air Terjun Kembar	1.500	1.327	2.225	2.798	2.801	9.456
4.	Taman Hutan Raya	12.600	9.822	18.258	8.068	10.076	58.824
5.	Hutan Mangrove Tongke-Tongke	59.425	67.170	77.826	65.866	37.216	307.503
6.	Benteng Balangnipa	-	-	183	1.163	1864	3.210
7.	Pulau Larea-Rea	-	-	455	2.393	2.827	5.675

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Selain beberapa pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Kalau tidak salah tahun 2021 atau 2022 yang paling banyak pengunjungnya. Sampai sekarang juga masih ramai yang datang. Paling ramai itu kalau libur-libur lebaran dan akhir tahun pasti ramai yang datang. Padat sekali memang didalam biasa sampai macet kendaraan.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jumlah pengunjung yang datang paling banyak yaitu pada tahun 2021 dan 2022. Meski pun saat sekarang ini pengunjung masih tetap ramai. Ada pun jumlah pengunjung yang datang sangat ramai pada saat libur lebaran dan tahun baru. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan kendaraan pengunjung yang mengakibatkan kemacetan jalanan.

Disisi lain yang perlu diperhatikan untuk menjadikan suatu objek wisata tersebut menjadi unggul selain jumlah pengunjung yang banyak tentu

dilihat dari ketersediaan fasilitas, akses, sarana dan prasarana. Semua aspek tersebut hampir terpenuhi pada objek wisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten sinjai. Berikut penjelasan dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai :

"Salah satu keuntungan dari objek wisata hutan mangrove tongke-tongke ini selain pemandangan hutan yang alami yaitu sangat mudah diakses. Hanya berjarak sekitar 5 KM dari pusat kota Sinjai dengan naik motor dan mobil bisa sampai langsung ke lokasi, jalannya juga bagus aspal. Untuk fasilitas sarana prasarannya ada tempat parkir kendaraan yang luas." (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa objek wisata hutan mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai selain memiliki kelebihan memberikan pemandangan indah yang alami, objek wisata tersebut juga sangat mudah untuk diakses oleh pengunjung dengan kondisi jalanan yang telah diaspal dan berjarak sangat dekat dari pusat Kota Sinjai yaitu sekitar 5 KM jarak tempuh yang dilalui. Dan kelebihan lainnya yang dimiliki yaitu tempat parkir kendaraan yang luas sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang berkendara.

Selain pernyataan diatas, terdapat juga pernyataan lain dari informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Uraian pernyataannya sebagai berikut :

"Untuk akses jalan disana sudah bagus beberapa fasilitas juga sudah bagus sarana prasara ada. Untuk akses jalannya sebenarnya sudah saya rencanakan untuk diubah jalurnya jadi langsung dari poros masuk lewat pertengahan sawah lurus masuk jadi lebih dekat lagi. Supaya

tidak melewati pemukiman warga namun lagi-lagi kita terbatas dipersoalan anggaran karena harus ada pembebasan lahan. Rencananya juga nanti didalam kawasan mau dibuatkan musholla, WC, sama cafe jadi pengunjung tidak harus keluar lagi kalau ingin sholat.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk akses jalan menuju lokasi kawasan hutan mangrove tongke-tongke sudah terbilang baik begitu pun dengan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia. Namun ada perencanaan pembangunan yang akan dilakukan terkait dengan hal-hal tersebut yang terhambat oleh keterbatasan anggaran. Mulai dari pembuatan akses jalan baru menuju objek wisata yang membutuhkan banyak anggaran terkait pembebasan lahan warga, kemudian musholla, WC, dan cafe didalam kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke.

Dari beberapa pernyataan yang sudah dijelaskan dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek wisata hutan mangrove tongke-tongke telah dijadikan sebagai objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dilakukan atas dasar banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke lokasi tersebut tiap tahunnya jika dibandingkan dengan objek wisata lain yang terdapat di Kabupaten Sinjai, selain itu juga pendapatan dari hasil retribusi yang didapatkan terbilang tinggi. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai untuk bisa mewujudkan wisata unggulan pun tentu ada upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan promosi wisata, mengadakan acara festival budaya,

pengadaan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada lokasi objek wisata hutan mangrove tongke-tongke. Selain itu, disamping adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan pengunjung, Objek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke memiliki kelebihan berupa akses yang mudah dijangkau serta lahan parkir kendaraan yang luas sehingga menjadi nilai tambah untuk memikat para pengunjung. Meski demikian, Pemerintah daerah telah berencana untuk melakukan pembangunan dan pengembangan lanjutan terkait pengadaan beberapa fasilitas dan juga pembukaan akses jalan baru namun sejauh ini masih terkendala dalam hal anggaran sehingga menghambat proses pembangunan di Objek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke.

c. Sasaran Pengembangan

Sasaran pengembangan dalam bidang pariwisata tentunya yang utama adalah objek wisata. Objek wisata adalah yang menjadi acuan utama berkembangnya pariwisata di suatu daerah. Disamping itu ada sasaran lain yang ingin dicapai dalam berkembangnya suatu objek wisata yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga dengan berkembangnya suatu objek wisata maka sebaiknya bersamaan dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar objek wisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten sinjai.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah melaksanakan kebijakan ini guna menciptakan

lapangan pekerjaan yang memadai sebagai sasaran pengembangan pada objek wisata, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“Ada banyak peluang kerja yang bisa didapat disana. Mulai dari jasa fotografi, jualan baju dari hasil cetak sendiri, jualan hasil kerajinan tangan, jualan makanan khas juga bisa. Semua bisa dilakukan sama masyarakat disana. Karena sudah pernah juga dibekali pelatihan-pelatihan sehingga tinggal mereka sendiri yang memanfaatkan peluang kerja yang ada. Dan itu memang tujuannya pariwisata dikembangkan supaya selain pemerintah mendapatkan pemasukan, masyarakat juga dapat penghasilan.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa ada banyak peluang kerja yang bisa didapatkan dari sektor pariwisata khususnya di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke, diantaranya mulai dari jasa fotografi, jualan baju dan hasil kerajinan tangan serta jualan makanan khas daerah. Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam hal meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja maka sering kali melaksanakan pelatihan-pelatihan dan *workshop* sehingga nantinya masyarakat mampu mendapatkan penghasilan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Uraian pernyataannya sebagai berikut :

”Kami sudah berupaya untuk membuat lapangan kerja disana namun belum maksimal. Padahal dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan harapannya ada hasil yang berlanjut. Jadi ini mereka yang ikut bisa jadikan itu sebagai sumber penghasilan,

pekerjaannya kalau mereka kembangkan. Tapi memang mereka kurang kreatif jadi susah.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat sekitar di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten sinjai. Berbagai kegiatan berupa pelatihan-pelatihan keterampilan telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar objek wisata. Meskipun demikian hal tersebut belum berjalan maksimal atau memberikan dampak positif diakibatkan oleh kurangnya kreatifitas dan konsisten dalam menindak lanjutkan hasil pelatihan-pelatihan yang didapatkan.

Selain beberapa pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Ketersediaanya sudah baik. Ada beberapa orang yang sudah dipekerjakan terutama dari masyarakat sekitar. Ada yang bertugas jadi penjaga karcis, petugas kebersihan dan keamanan. Ada juga yang jadi tukang parkir sama pokdarwis juga. Jadi bisa dibilang lapangan pekerjaan sudah ada. Ditambah lagi banyak yang jual-jualan juga didalam kawasan itu.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Hal senada juga disampaikan oleh informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, yang mengatakan bahwa :

“Kalau lapangan pekerjaan di objek wisata Hutan Mangrove sudah lumayan. Ada petugas penjaga karcis, petugas kebersihan dan petugas-petugas yang lain. Tapi kalau mau mencari penghasilan disana ada banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya. Tergantung dari kemauan masyarakat. Terutama yang pernah ikut pelatihan-pelatihan sebenarnya itu bisa diteruskan. Apalagi disana ramai pengunjung jadi banyak bisa dikerja untuk dijual supaya bisa berpenghasilan.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan sudah ada baik itu petugas karcis, petugas kebersihan dan juga petugas lainnya. Dan masih banyak lagi peluang kerja yang tersedia untuk masyarakat disekitar objek wisata hutan mangrove tongke-tongke, hanya saja dibutuhkan kreatifitas untuk memanfaatkan peluang kerja yang ada terutama bagi masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan keterampilan.

Informan AK juga mempertegas selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Ketersediaanya sudah baik. Ada beberapa orang yang sudah dipekerjakan terutama dari masyarakat sekitar. Ada yang bertugas jadi penjaga karcis, petugas kebersihan dan keamanan. Ada juga yang jadi tukang parkir sama pokdarwis juga. Jadi bisa dibilang lapangan pekerjaan sudah ada. Ditambah lagi banyak yang jual-jualan juga didalam kawasan itu.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan sudah baik. Ada yang telah dipekerjakan sebagai petugas penjaga karcis, petugas kebersihan, petugas keamanan dan

pokdarwis. Adapun petugas-petugas tersebut diutamakan dari masyarakat sekitar objek wisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten sinjai.

Dari beberapa pernyataan yang sudah dijelaskan dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah berupaya mengembangkan lapangan pekerjaan di kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke sebagaimana yang menjadi sasaran pengembangan dalam implementasi kebijakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar objek wisata mulai dari adanya petugas parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, pokdarwis, petugas parkir. Selain itu upaya yang dilakukan juga berupa memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan keterampilan yang relevan bagi masyarakat sekitar agar mampu dikembangkan menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan seperti menjadi fotografer, menjual sablon baju, kerajinan tangan, masakan khas daerah, dan lain-lain.

2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena melibatkan para pemangku kepentingan dalam prosesnya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting pada proses kebijakan. Sebagaimana suatu kebijakan yang sudah

dibuat maka perlu untuk dilaksanakan. Keberhasilan komunikasi pada tahapan ini bisa saja mempengaruhi langkah-langkah kebijakan agar bisa terwujud. Ada pun beberapa indikator pada komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Transmisi

Transmisi pada komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak yang memiliki wewenang atau yang sebagai pembuat kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat pada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tahapan transmisi sangatlah penting sebab untuk memastikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dijalankan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat waktu untuk para pemangku kepentingan dan juga tersampaikan kepada kelompok sasaran.

Berikut hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa :

“kalau untuk komunikasi yang telah kami lakukan dalam melaksanakan kebijakan ini bisa dibilang telah berjalan dengan baik, karena setiap saat apabila ada yang akan dilaksanakan pasti dikomunikasikan terlebih dahulu. Hal ini guna mencegah terjadinya miskomunikasi saat dijalankan. Kami biasanya berkomunikasi dalam forum-forum rapat atau diskusi.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari hasil pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata telah dilakukan dengan baik guna mencegah terjadinya miskomunikasi pada saat pelaksanaan kebijakan. Adapun komunikasi yang intens dilakukan melalui forum-forum pertemuan rapat atau diskusi.

Sehingga informasi atau pesan-pesan yang disampaikan sangat jelas dan mudah untuk dipahami.

Selanjutnya informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengungkapkan bahwa :

“Sebagai pelaksana kebijakan ini kami sangat aktif terlibat didalamnya. Kami selalu aktif membangun komunikasi dengan para *stakeholder* melalui pertemuan-pertemuan rapat kordinasi baik itu ditingkat daerah, provinsi bahkan sampai ke kementerian. Kami sering melakukan itu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan maupun program yang akan dijalankan. Sehingga informasi-informasi ini bisa diketahui diberbagai tingkatan pelaksana. Dan tentunya juga kami berharap adanya dukungan yang bisa diberikan.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024) MS

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa transmisi informasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai kepada para stakeholder diberbagai tingkatan, mulai dari tingkat daerah, tingkat provinsi sampai pada tingkat kementerian. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi tentang kebijakan dan program yang akan dijalankan sekaligus permohonan dukungan dalam pelaksanaan.

Kemudian informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga mempertegas dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Diawal sebelum melaksanakan kebijakan atau suatu program yang pertama tentunya diadakan pertemuan atau sosialisasi, rapat kordinasi dengan organisasi atau instansi-instansi yang berkaitan guna menyampaikan muatan informasi yang dianggap penting untuk

dijalankan. Ada banyak hal yang disampaikan sehingga kita bisa bersama-sama bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024) AK

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa yang pertama dilakukan sebelum melaksanakan kebijakan atau program adalah melakukan pertemuan atau sosialisasi baik itu dalam bentuk rapat kordinasi bersama organisasi atau instansi-instansi yang terlibat. Saat itulah penyampaian informasi disampaikan berkaitan dengan hal-hal yang dianggap penting dan utama untuk dilaksanakan nantinya. Sehingga tercipta kerja sama atau sinergitas dalam melaksanakan program atau kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, juga mengatakan bahwa :

“Kita lakukan sosialisasi kebijakan ke pihak-pihak yang berkaitan atau terlibat mulai dari dinas-dinas terkait sampai kepada masyarakat. Tujuannya agar supaya informasi yang diberikan bisa tersalurkan dan bisa dipahami bersama. Dan komunikasi ini kami sering lakukan, berkordinasi satu sama lain agar kebijakan bisa terlaksana dengan baik.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan, Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak dan instansi yang turut serta terlibat. Tujuannya tentu agar informasi-informasi dalam pelaksanaan kebijakan bisa tersampaikan dan dipahami secara bersama-sama sehingga kebijakan

pariwisata bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Selain informan dari pihak pemerintah peneliti juga melakukan wawancara dengan informan masyarakat disekitar objek wisata hutan mangrove tongke-tongke. Informan NA selaku masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Sebagai masyarakat disini merasa sangat perlu untuk terlibat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, karena bagaimana pun tujuan kebijakan itu kan demi kebaikan bersama guna memajukan pariwisata yang ada disini. Kalau untuk komunikasi dan informasi biasanya dilakukan melalui sosialisasi atau rapat bersama masyarakat dan aparat desa. Biasanya kami berdiskusi untuk memberikan saran dan masukan terkait aktivitas pariwisata disini.” (Hasil wawancara tanggal 22 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat disekitar objek wisata telah dilibatkan dalam proses penyampaian informasi melalui forum komunikasi diskusi dan sosialisasi. Sehingga masyarakat yang ada bisa memahami kebijakan yang ada dan masyarakat pun bisa memberikan saran dan masukan terhadap apa yang sebaiknya dilakukan untuk kebaikan bersama bisa tercapai.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan A selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“masyarakat sudah semestinya ikut terlibat dan mendukung berjalannya kebijakan pariwisata karena untuk kebaikan bersama disini. Dinas juga sudah sering datang di Desa memberikan informasi melalui rapat atau pertemuan dengan para tokoh masyarakat jadi kita saling berdiskusi dan saling berkomunikasi juga untuk proses-proses

pengembangan wisata hutan mangrove”. (Hasil wawancara tanggal 22 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa transmisi komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat yang ada disekitar objek wisata berjalan dengan baik melalui forum diskusi atau forum rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses transmisi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu tersampaikan melalui forum-forum rapat dan sosialisasi bersama dengan aparat desa, masyarakat, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitar objek wisata. Hal tersebut dilakukan agar muatan kebijakan yang dilaksanakan bisa tersampaikan dengan baik dan benar, begitu pun dengan masyarakat yang memberikan saran dan masukan kepada pemerintah bisa diterima dengan baik pula.

2. Kejelasan Informasi

Dalam komunikasi pada implementasi kebijakan kejelasan informasi mengarah pada ketegasan serta kemudahan untuk memahami pesan dan informasi yang tersampaikan untuk *stakeholder* yang ikut pada proses implementasi kebijakan. Informasi yang jelas adalah hal penting pada tahapan komunikasi sebab bisa memberi pengaruh pada pesan yang dipahami, diterima, dan dijalankan dengan baik dari penerima. Setelah

kebijakan tersampaikan kepada pelaksana atau sasaran dengan baik maka secara langsung telah diketahui maksud maupun tujuan dari kebijakan yang akan dilaksanakan, dengan demikian dipahami apa yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, tentang kejelasan informasi komunikasi pada implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai dijelaskan sebagai berikut :

“Untuk informasi tentang kebijakan ripparkab sudah dijalankan dengan cukup baik. Upaya yang kami lakukan terkait penyebaran informasi ini disampaikan melalui media seperti di internet atau situs web sehingga semua kalangan bisa mengakses atau menjangkau informasi ini secara terbuka.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa informasi tentang kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan atau disampaikan melalui media informasi internet yang terdapat di situs atau web instansi dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai. Sehingga dengan demikian semua informasi bisa didapatkan dengan mudah oleh setiap orang dengan terbuka dan bebas.

Informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga mengungkapkan bahwa :

“Informasi yang kami berikan tentang kebijakan pariwisata itu sudah jelas dan bisa dilihat melalui situs website internet kantor kami yaitu disparbud.sinjaikab.go.id. Disitu bisa dilihat dan dibaca oleh siapa saja

yang memerlukan informasi. Jadi terbuka dan bebas kapan pun dan dimana pun. Dan sudah juga disosialisasikan kepada masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa selain melalui sosialisasi yang dilakukan, informasi tentang kebijakan pariwisata bisa diakses dan dibaca oleh siapa pun dan kapan pun dengan jelas melalui situs website internet yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yaitu disparbud.sinjaikab.go.id.

Selanjutnya juga pernyataan dari AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang didukung oleh pemerintah daerah telah berupaya memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat dengan berbagai strategi yang dilakukan. Tujuannya tentu agar supaya kebijakan pariwisata bisa diketahui dan dipahami bersama sehingga ada sinergitas antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Strategi yang kami lakukan itu meliputi penyediaan situs internet disparbud, iklan di media liputan dan media sosial yang kami miliki.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah didukung oleh pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas melalui strategi yang dimiliki. Strategi yang dijalankan yaitu menyediakan situs internet yang mudah diakses, kemudian pemasangan iklan di media liputan dan juga pada media sosial yang dimiliki. Sehingga masyarakat bisa mengetahui seputar kebijakan pariwisata yang telah dijalankan.

Hal senada diungkapkan oleh informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, yang mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini kalau tentang penyampaian informasi kebijakan pariwisata itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi pemerintah daerah bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama-sama berusaha melakukan dengan baik dan jelas. Ada berbagai cara yang telah dilakukan yaitu dibuatkan situs web, media sosial seperti instagram, dan juga media-media liputan. Jadi kita manfaatkan juga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi tentang pariwisata dan kebijakan.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari hasil pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai telah dilakukan dengan baik dan jelas bersama dengan pemerintah daerah. Berbagai cara yang dilakukan dalam penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan jelas melalui beberapa media seperti halnya media internet berupa situs web yang dimiliki kemudian media sosial seperti instagram dan media-media liputan. Hal tersebut yang dilakukan juga merupakan bagian dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pariwisata.

Selain informan dari pemerintah peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang kejelasan informasi yang didapatkan dalam hal implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai. Informan NA sebagai masyarakat menjelaskan bahwa :

“Menurut saya untuk informasi seputar kebijakan pariwisata di Sinjai bisa dibilang sudah bagus pelaksanaannya. Khususnya di sini objek wisata hutan mangrove. Informasi bisa sangat mudah dan jelas didapatkan dari media sosial instagram dan juga di situsnya Disparbud Sinjai. Biasa kalau ada event-event pariwisata bisa langsung didapat informasinya dari instagram dan jelas disitu disampaikan.” (Hasil wawancara tanggal 22 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi dan kejelasan tentang pelaksanaan kebijakan pariwisata sudah baik dilaksanakan khususnya di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai. Informasi bisa dengan mudah didapatkan melalui media sosial instagram dan situs internet yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Ada pun informasi dengan jelas tersampaikan meliputi kegiatan atau event-event yang dilaksanakan tentang kepariwisataan.

Selain informan NA, ada pula informan A sebagai masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Informasi tentang kebijakan pariwisata saat ini sudah bagus. Informasi bisa didapatkan dengan mudah dan terbuka untuk siapa saja. Biasanya dapat informasi tentang pariwisata itu di instagramnya dinas pariwisata atau bisa juga diakses disitus internetnya. Disana jelas semua informasi tentang kegiatan-kegiatan pariwisata bisa di dapatkan.” (Hasil wawancara tanggal 22 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa informasi mengenai kebijakan pariwisata terbilang baik. Sebab informasi bisa dengan mudah didapatkan secara terbuka dan jelas melalui media instagram dan situs internet yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Ada pun informasi yang didapatkan tentang kegiatan-kegiatan pariwisata yang dijalankan.

Berdasarkan penjelasan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi kebijakan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah tersampaikan dengan jelas. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh kemudahan dan kejelasan informasi yang disampaikan dan didapatkan oleh masyarakat melalui media internet yang disediakan oleh Disparbud selain itu ada juga melalui sosial media instagram dan media-media liputan. Sehingga segala aktivitas atau pun kegiatan-kegiatan tentang kebijakan kepariwisataan bisa diketahui dengan mudah secara terbuka.

3. Konsistensi

Konsistensi dalam suatu kebijakan sangat diperlukan agar kebijakan tersebut tidak berubah-ubah yang menimbulkan kesulitan bagi pelaksana kebijakan maupun *stakeholder* yang ada serta kelompok sasaran. Sehingga pada akhirnya kebijakan yang dijalankan tidak efektif dan optimal. Begitu pun juga konsistensi dalam implementasi kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting guna mencapai keberhasilan yang diinginkan. Konsistensi dalam komunikasi merupakan penyampaian pesan yang sama secara konsisten dan tetap tanpa adanya perbedaan kepada para pemangku kepentingan. konsistensi dalam hal ini bertujuan agar apa yang disampaikan memiliki kesamaan pemahaman tentang sasaran dan tujuan kebijakan itu sendiri khususnya dibidang pariwisata.

Pesan yang konsisten dan jelas sangat memudahkan dalam mencegah terjadinya kebingungan dan kesalahpahaman yang bisa menghambat pada pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pariwisata semua informasi sebaiknya dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Konsistensi komunikasi akan memastikan bahwa informasi yang diberikan akan sama, akurat dan jelas, sehingga memudahkan proses implementasi kebijakan. Dan apabila ada terjadinya perubahan atau penyesuaian yang dibutuhkan maka pemangku kepentingan bisa dengan mudah dan cepat mengetahui serta memahami perubahan tersebut.

Berikut penjelasan dari hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang konsistensi informasi kebijakan pariwisata :

“Dinas pariwisata dalam menjalankan kebijakan pariwisata ini berdasarkan rancangan yang telah disepakati bersama baik itu rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi sudah ditentukan apa saja yang akan dilakukan pada tahun ini dan tahun-tahun kedepannya. Namun kembali lagi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi sudah ada semua ketentuannya dan tinggal dijalankan. Dan hal ini kita informasikan, kita bahas bersama dalam rapat-rapat, melakukan kordinasi terkait apa saja yang bisa dijalankan kedepannya.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai telah dilakukan dalam bentuk rancangan kegiatan yang telah disepakati bersama baik itu rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Ketetapan inilah yang

menjadi dasar untuk dijalankan dalam hal pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai. Namun adapun setiap rencana yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dan setiap informasi yang ada disampaikan melalui rapat-rapat koordinasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Uraian pernyataannya sebagai berikut :

“konsistensi dalam penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan pariwisata sudah kami lakukan. Baik itu informasi mengenai kegiatan, anggaran, kerja sama antar pihak-pihak dan hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan sudah kami lakukan. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata baik itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau nanti tahun depan, itu sudah direncanakan semua dengan baik secara konsisten terus-menerus.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata baik itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau pun kedepannya telah dilakukan dengan konsisten secara terus-menerus. Baik itu informasi tentang rencana kegiatan, anggaran, dan kerja sama dengan pihak lain serta hal-hal penting lainnya.

Ada pula Informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga dalam pernyataannya sebagai berikut :

“ ketika menjalankan kebijakan pariwisata atau pun program-program yang ada, kita jalankan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dan dibahas bersama sehingga apa pun yang dilakukan bisa konsisten

dan diketahui bersama. Dan informasinya mengenai apa yang segera dilakukan pastinya tersampaikan kepada setiap pihak-pihak yang terlibat sehingga juga mempermudah kita dalam menjalankan tugas masing-masing.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam menjalankan kebijakan pariwisata atau program-program yang ada, telah dijalankan sesuai dengan rancangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut tentunya untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Ada pun informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya dipastikan tersampaikan kepada *stakeholder* demi mempermudah setiap yang terlibat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, juga yang mengatakan bahwa :

“Kita telah berkomitmen untuk memberikan informasi dengan cepat mengenai pelaksanaan kebijakan pariwisata. keterbukaan informasi yang diberikan tentunya adalah hal positif yang seharusnya diberikan secara konsisten kepada siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah berkomitmen dalam memberikan informasi dengan cepat tentang proses pelaksanaan kebijakan pariwisata. Ada pun informasi yang diberikan secara terbuka kepada setiap pihak yang membutuhkan merupakan suatu hal positif yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan secara konsisten.

Selain informan dari pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait topik yang dibahas. Ada pun informan NA menjelaskan bahwa :

“konsistensi mengenai informasi yang diberikan oleh dinas pariwisata terbilang baik. Sebab informasi mengenai pariwisata bisa dipantau secara rutin di media sosial instagramnya dan juga di laman situs internet disparbud. Semuanya update diinformasikan dan sangat jelas yang disampaikan. Sehingga kita sebagai masyarakat bisa mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan tentang pengembangan aktivitas pariwisata di Sinjai.” (Hasil wawancara tanggal 22 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memberikan informasi secara konsisten tentang kegiatan kepariwisataan di media sosial instagram dan juga pada situs internet yang dimiliki. Informasi yang diberikan pun merupakan informasi terbaru dan terkini sehingga masyarakat bisa dengan cepat mengetahui perkembangan seputar kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan A sebagai masyarakat bahwa :

“Sebagai warga masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata hutan mangrove ini, saya merasa sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pariwisata di Kabupaten Sinjai khususnya kalau ada event atau kegiatan yang akan dilaksanakan disini. Informasi yang biasa saya dapatkan itu melalui media instagram dan whatsapp. Jadi informasi yang didapatkan itu sangat jelas dan konsisten dilakukan.” (Hasil wawancara tanggal 22 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa informasi tentang pelaksanaan kebijakan pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kepariwisataan bisa didapatkan dengan mudah

melalui media instagram dan whatsapp. Informasi yang didapatkan sangat jelas dan konsisten. Hal tersebut tentunya demi keterbukaan informasi pelaksanaan kebijakan pariwisata di Kabupaten Sinjai.

Dari semua penjelasan para informan yang disampaikan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menjaga konsistensi informasi maka perlu adanya perancangan tentang agenda program atau kegiatan yang telah ditetapkan bersama dan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata. Hal tersebut untuk memastikan kejelasan informasi yang disampaikan bisa konsisten berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Ada pun informasi yang diberikan disampaikan melalui media sosial dan media internet berupa situs web yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dengan demikian para aktor yang terlibat dan masyarakat bisa mengetahui setiap aktivitas agenda kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata dengan jelas.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang terdapat pada implementasi kebijakan pariwisata mengarah pada berbagai aspek mendasar untuk melaksanakan kebijakan pariwisata secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini sumber daya merupakan modal awal yang menjadi dasar untuk pengembangan, pengelolaan serta memasarkan pariwisata. Ada pun sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya

manusia, sumber daya finansial atau anggaran, dan material atau sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan pariwisata merupakan hal mendasar yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pada penyelenggaraan pariwisata di suatu daerah atau negara. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah semua orang yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai maka akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, tentang sumber daya manusia pada implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai dijelaskan sebagai berikut :

“SDM yang tersedia di kantor kami sudah memadai. Di struktur ada enam belas orang yang berkerja dengan tugasnya masing-masing. Kalau untuk di lokasi wisata juga ada beberapa orang. Dan selalu diikutkan kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang sudah cukup memadai.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kebijakan rencana induk pariwisata di Kabupaten Sinjai telah memiliki sumber daya manusia yang dianggap memadai yang terdiri dari enam belas orang pegawai pada struktur organisasi yang berkerja berdasarkan tugasnya masing-masing.

Selain itu juga, terdapat pula beberapa tambahan orang yang bertugas di beberapa objek wisata. Dan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai maka sering kali diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

Informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Juga memberikan uraian pernyataannya sebagai berikut :

“Dinas pariwisata dalam menentukan anggota yang dibutuhkan tentu melakukan kualifikasi terlebih dahulu. Kita lihat apakah yang bersangkutan mampu menjalankan pekerjaan tertentu atau tidak, berapa jumlah yang dibutuhkan, bagaimana pengetahuan dan keterampilannya. Sehingga dengan begitu sumber daya yang kita dapatkan bisa relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan ini. Selain itu, Kalau kita berbicara SDM untuk dilokasi wisata ini sudah berapa kali kita lakukan pembinaan hampir kayanya tiap tahun, pembinaan pengembangan destinasi, pembinaan masalah home stay, pembinaan industri kreatif, malahan pernah kita lakukan untuk tour gate kalau ada tamu. Banyak sekali pelatihan sudah kita laksanakan libatkan masyarakat. Ada juga pelatihan untuk kuliner, cara buat hidangan yang bagus. Tapi setelah itu saya lihat kurang yang laksanakan. Jadi kalau untuk SDM sudah tersedia tinggal pengembangan skillnya saja mau ditingkatkan.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam menyediakan pegawai dalam rangka pelaksanaan kebijakan pariwisata tentunya melihat terlebih dahulu kualifikasi yang dibutuhkan mengenai kemampuan yang dimiliki apakah relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Selain itu untuk sumber daya manusia yang terdapat dilokasi objek wisata, maka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dilaksanakan

pelatihan, pembinaan dan pengembangan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam dunia pariwisata.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Orang-orang yang terlibat itu ada banyak. Pegawai disini saja sudah cukup banyak. Jadi dalam menjalankan kebijakan sudah memadai. Pernah diikutsertakan mengikuti bimtek selama beberapa hari. Jadi pengetahuannya bisa bertambah dalam mengembangkan pariwisata.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah memadai dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada pun untuk menambah keterampilan dan pengetahuan tentang sektor pariwisata maka diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan bimtek.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal dalam menentukan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan pariwisata yaitu melakukan kualifikasi terkait dengan kemampuan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan dalam melaksanakan kebijakan pariwisata, selanjutnya melakukan pelatihan, peningkatan, dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan kepada pegawai dibidang pariwisata agar mampu menjalankan kebijakan pariwisata sesuai dengan tujuan secara efektif.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial pada implementasi kebijakan pariwisata merupakan segala yang berkaitan dengan anggaran atau dana sebagai sumber keuangan yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan kebijakan, program, rencana proyek kepariwisataan pada suatu daerah. Sumber daya finansial ini juga sangatlah penting digunakan untuk membangun, mengembangkan, dan memperbaharui sarana dan prasarana infrastruktur maupun promosi dibidang pariwisata.

Berikut penjelasan dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“Untuk dana tahun ini ada namun digunakan untuk bidang kebudayaan. Makanya tahun ini ada banyak event yang diselenggarakan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ada untuk infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata. Sumber dana yang kami dapatkan ada dari APBD, APBN, DAK,DAU kemudian juga ada dana CSR. Seperti di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke pernah dapat dana CSR dari Bank Indonesia (BI). Banyak sumber dana namun terbatas.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan dalam rangka untuk pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai berasal dari dana pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu APBD, APBN, DAK, DAU. Ada pula dana hasil kerja sama berupa CSR yang didapatkan dari Bank Indonesia (BI).

Namun pada kenyataannya anggaran yang didapatkan cenderung terbatas dan tidak pernah cukup untuk digunakan.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Uraian pernyataannya sebagai berikut :

“Untuk sekarang tidak ada anggaran untuk pengembangan. Kecuali tahun-tahun kemarin ada beberapa. Tahun ini hanya untuk bidang kebudayaan. Dulu sumber dana dari pusat DAK, ada juga dari hibah provinsi, ada juga DAU tapi sekarang sudah tidak ada ini. Kalau untuk dana paling besar itu dari dana pusat DAK.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun ini dana untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai dalam hal pelaksanaan kebijakan pariwisata terbilang sangat minim, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan kucuran dana untuk pengembangan pariwisata sehingga pelaksanaan kebijakan pariwisata bisa dimaksimalkan. Ada pun sumber dana yang didapatkan berasal dari dana pusat berupa DAK, selain itu terdapat pula dana hasil bantuan hibah dari tingkat provinsi. Namun jika dilihat sumber dana terbesar yang didapatkan adalah sumber dana dari DAK pusat.

Selanjutnya informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Juga memberi pernyataannya sebagai berikut :

“Untuk penggunaan dana yang digunakan itu dari DAK, DAU, dan hibah dari provinsi. Cuman yang selalu ada itu dana dari DAU, tiap tahun itu ada karena diberikan kepada setiap SKPD dari pemerintah,

dan penggunaannya tergantung dari apa yang direncanakan.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata dana yang digunakan merupakan sumber dari dana DAK, DAU, dan dana hibah. Namun dana yang selalu tersedia untuk digunakan adalah dana yang berasal dari dana DAU yang diberikan dari pemerintah yang penggunaannya sesuai yang telah direncanakan.

Berdasarkan penjelasan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai dari segi sumber daya finansial menggunakan dana yang didapatkan dari beberapa sumber yaitu dana APBD yang didapatkan dari pemerintah daerah, kemudian dana hibah yang didapatkan dari pemerintah provinsi. Selanjutnya sumber dana yang didapatkan dari pusat yaitu dana APBN dan dana DAK. Sehingga dengan demikian proses pelaksanaan kebijakan pariwisata sangat bergantung pada sumber-sumber dana yang didapatkan, meski pada kenyataannya dana yang dibutuhkan seringkali dianggap masih kurang.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang berbentuk fisik atau material yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pariwisata. Ada pun sarana dan prasarana tidak terlepas dari besarnya dukungan dari dana yang tersedia atau sumber daya finansial. Sebab

kelancaran pembangunan sarana dan prasarana dipengaruhi oleh dana yang digunakan. Dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata tentunya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan demi mendukung terselenggaranya sektor pariwisata dengan baik. Dimulai dari tersedianya infrastruktur jalan yang baik, fasilitas transportasi, akomodasi, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang tersedia dilokasi objek wisata. Selain itu pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya demi menjaga kelancaran dan kenyamanan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata terlebih untuk keberhasilan berjalannya proses pelaksanaan kebijakan pariwisata dengan baik.

Berikut hasil wawancara bersama informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai terkait sarana dan prasarana yang tersedia dalam proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai :

“Untuk sarana disana masih kurang, karena kenapa itu kan kawasan hutan lindung otomatis agak susah aturannya, harus ada ijin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga untuk mengembangkan tongke-tongke agak sulit, selain itu harus juga ada investor yang masuk. Kalau hanya pemerintah yang laksanakan itu sulit.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang memadai. Salah satu hambatan yang dialami yaitu terkait dengan izin pembangunan yang berada didalam kawasan lindung. Sehingga dibutuhkan beberapa tahapan prosedural dari Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika ingin melaksanakan pembangunan terkait sarana dan prasarana di kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke. Selain itu dibutuhkan pula kerja sama dengan pihak swasta atau investor dalam hal pengembangan karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengungkapkan bahwa :

“Objek wisata hutan mangrove itu disana memang belum lengkap fasilitasnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi musholla dan toilet untuk didepan lokasi disekitaran gerbang dan didalam kawasan. Sudah direncanakan dan sementara diusahakan untuk anggarannya. Dan untuk fasilitas yang lainnya sudah tersedia, akses jalankan juga sudah bagus. Jadi yang kurang cuman itu tadi.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam hal pelaksanaan kebijakan pariwisata terkait sarana dan prasarana di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke masih terbilang kurang dengan tidak tersedianya fasilitas seperti tempat ibadah dan toilet. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya anggaran yang tersedia. Sehingga menghambat proses pembangunan fasilitas tersebut. Namun untuk infrastruktur berupa akses jalan sudah baik.

Selain itu Informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa :

“Masih perlu ditingkatkan lagi sarana prasarananya disana. Karena masih ada beberapa yang kurang. Cuma lagi-lagi karena keterbatasan anggaran sehingga belum bisa maksimal pengadaannya disana. Belum lagi untuk pemeliharanya juga butuh anggaran.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengadaan sarana dan prasarana masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi terkait kekurangan yang ada. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya anggaran yang didapatkan. Ditambah lagi dengan biaya perawatan yang perlu dikeluarkan untuk sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga masih menjadi kendala yang belum terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan dari para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam menjalankan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata terkait dengan kondisi sarana dan prasarana masih terbilang belum maksimal yang disebabkan oleh masih kurangnya beberapa fasilitas yang tersedia di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke. Ada pun kendala tersebut diakibatkan oleh minimnya anggaran yang tersedia. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah sulitnya melakukan pembangunan fisik didalam kawasan lindung hutan mangrove yang harus disertai dengan kesesuaian prosedural berizin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan pariwisata mengarah kepada proses pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab kepada setiap pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pariwisata. Dalam

hal ini yaitu pihak-pihak yang berkaitan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pariwisata, masyarakat lokal, pihak swasta dan *stakeholder* lainnya. Disposisi ini seharusnya memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pariwisata mempunyai peran dengan jelas serta tanggung jawab yang spesifik. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Selain itu disposisi juga sebaiknya memperhatikan pembagian sumber daya yang sesuai untuk berbagai pihak yang terlibat sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa dijalankan dengan baik. Hal yang dimaksud adalah seperti tenaga kerja, sarana prasarana, anggaran dan yang lainnya.

1. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan pariwisata dapat dikatakan mengarah kepada pemilihan atau penunjukan pegawai atau staf yang akan bertanggung jawab untuk menangani atau mengurus pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Sehingga dalam proses pemilihan atau penunjukan tersebut harus memiliki komitmen dan dedikasi yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab. Selain itu juga, dalam pelaksanaannya sebaiknya bisa memberikan peningkatan dan pengembangan didalam menjalankan program-program yang relevan dalam proses implementasi kebijakan pariwisata.

Berikut penjelasan dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang pengangkatan birokrasi dalam

pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“Untuk pelaksanaan kebijakan ini kami selektif dalam memilih pegawai yang bertugas dan paham dengan apa yang akan dikerjakan. Dan yang dilihat itu pendidikannya dan pengalamannya. Jadi yang dipilih memang yang betul-betul bisa melaksanakan. Disamping disesuaikan juga dengan bidang yang ada.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan atau seleksi pegawai yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab, yang utama dilihat adalah jenjang pendidikan dan tentunya pengalaman yang dimiliki. Selain itu disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang yang ada dalam struktur organisasi. Sehingga dengan begitu, pegawai mampu melaksanakan kebijakan dengan baik dan efektif sesuai tugas yang diberikan.

Selanjutnya informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga mengungkapkan bahwa :

“Dalam mekanisme perekrutan terkait pelaksanaan kebijakan, ada standar yang dilihat. Mulai dari keaktifannya, responsif atau tidak, dan yang paling penting paham dengan yang akan dikerjakan. Karena kalau tidak begitu, pasti akan merepotkan tim kerja nanti. Akhirnya kebijakan tidak berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan birokrasi pegawai yang terpilih harus memiliki sikap aktif dan responsif dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan dan

memiliki pemahaman yang baik. Sehingga bisa menjalankan kegiatan atau program dalam implementasi kebijakan pariwisata.

Informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pun mengatakan bahwa :

“Agar memudahkan proses pelaksanaan kebijakan ini, yang kita pilih tentunya yang berkompeten dibidangnya, yang punya kinerja baik. Jadi pekerjaan yang dikerjakan bisa lancar dan baik. Dan tentunya juga paham dan punya minat dengan dunia pariwisata.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan baik dan benar, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam memilih pelaksana tugas sebaiknya memiliki kompetensi dibidangnya, selain itu juga memiliki kinerja yang baik dan memiliki wawasan dan minat dalam dunia pariwisata.

Dari semua pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengangkatan birokrasi atau pegawai yang akan menjalankan kebijakan pariwisata, pemilihan pegawai yang utama dilihat adalah jenjang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Selain itu dalam pengangkatan birokrasi, pegawai harus aktif, responsif, dan memiliki pemahaman yang baik untuk menjalankan program kebijakan pariwisata. Pegawai sebagai pelaksana tugas juga perlu memiliki kompetensi, kinerja baik, serta minat dalam bidang pariwisata. Sehingga pegawai nantinya mampu melaksanakan kebijakan dengan baik dan efektif sesuai dengan yang ingin dicapai.

2. Insentif

Dalam proses implementasi kebijakan ada namanya stimulus atau pemicu yang seringkali diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dari pemberi kebijakan untuk memotivasi atau sebagai penyemangat dalam menjalankan kebijakan. Stimulus tersebut berupa insentif yang bertujuan untuk menambah partisipasi, kinerja dan semangat guna mencapai tujuan kebijakan dengan baik.

Berikut penjelasan dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang insentif dalam pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“Dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata, kita sebagai pegawai yang menjalankan tugas tentunya ada insentif atau gaji yang didapatkan. Namun besarnya tentu berbeda-beda tiap pegawai. Dilihat dari pangkat golongan dan jabatan yang dimiliki sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Tapi meskipun berbeda, kita tetap menjalankan tugas dengan baik.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai didalam menjalankan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata tentunya ada insentif atau gaji yang didapatkan dengan jumlah berbeda-beda yang didapatkan. Besaran insentif ditentukan oleh pangkat golongan dan jabatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Untuk insentif pegawai kita itu berupa gaji yang didapatkan tiap bulannya. Kalau untuk teman-teman tenaga sukarela mereka juga ada yang didapatkan tapi tidak tiap bulannya. Jadi mereka mendapatkan insentif kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baru ada didapat. Itu sesuai dengan aturan dan dananya dari dana DAU.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pemberian insentif pegawai PNS yang berkerja dalam pelaksanaan kebijakan yaitu berupa gaji yang diberikan setiap bulan selama masa kerja. Berbeda dengan pegawai yang berstatus tenaga sukarela, mereka hanya mendapatkan insentif apabila ada kegiatan-kegiatan pariwisata yang telah dilaksanakan. Sehingga banyak sedikitnya insentif yang didapatkan ditentukan pula dengan jumlah kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan.

Selanjutnya informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pun dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Yang mendapatkan insentif itu tenaga sukarela. Itu pun kalau terlibat dalam kepanitiaan dan ada SK kepanitiannya. Tapi biasanya juga tidak dapat kalau tidak ada dananya. Kalau yang petugas di objek wisata itu juga mereka dapat insentif tetapi dari Bapenda, itu mereka yang atur.” (Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa insentif diberikan kepada tenaga sukarela yang mengikuti kepanitiaan pada kegiatan yang

diselenggarakan dengan memiliki SK kepanitiaan. Meski demikian insentif yang diberikan tidak selamanya ada sebab disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Selain itu, terdapat pula petugas-petugas yang berkerja di objek wisata mereka pun mendapatkan insentif yang ditentukan oleh Bapenda.

Dari semua pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan pekerjaan terhadap pelaksanaan kebijakan pariwisata bahwa insentif yang diberikan yaitu berupa uang atau gaji sesuai jabatannya masing-masing baik itu yang berstatus PNS, tenaga sukarela maupun petugas. Hal ini tentunya menjadi penyemangat atau motivasi didalam meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan guna mencapai tujuan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan adalah merupakan susunan dari suatu organisasi atau hubungan antara berbagai bidang-bidang dalam suatu birokrasi yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi ini juga saling berkerja sama dalam mengembangkan rencana, mengatur, dan memantau proses pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya dalam proses pelaksanaan kebijakan memiliki banyak hal yang semestinya dijalankan sesuai dengan aturan atau standar acuan, dengan begitu setiap struktur yang

menjalankan tugas bisa bertanggung jawab dengan sesuai dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

1. Standar Operasional Prosedur

Standar operational prosedure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata merupakan petunjuk yang tertulis untuk mengatur tahapan-tahapan yang harus dijalankan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan SOP dibuat agar menjaga konsistensi, efisiensi, serta kualitas saat proses pelaksanaan kebijakan dalam hal ini meliputi tugas-tugas terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata, serta untuk menjaga bahwa setiap langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu SOP juga membantu untuk memperjelas pelaksanaan kebijakan pariwisata dengan memberikan petunjuk yang wajib diikuti dan memberikan panduan yang jelas. Dengan adanya SOP sangat membantu para pelaksana untuk mengetahui apa yang akan dijalankan dan bagaimana cara melakukannya, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata bisa dijalankan dengan sangat efektif dan efisien. Selain itu, perlu untuk diketahui bahwa dalam SOP sebaiknya disesuaikan dengan keadaan serta dibuat dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan juga SOP sebaiknya mudah untuk dipahami dan relevan dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai. SOP juga sebaiknya diperbaharui secara berkala untuk menyesuaikan apabila ada perubahan keadaan atau kebijakan pariwisata.

Berikut penjelasan dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang SOP dalam pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“Untuk SOP pelaksanaan dari kebijakan ini tentunya sudah ada. Dan yang dilakukan pun sudah sesuai dengan SOP yang ada. Baik itu dalam hal penggunaan anggaran maupun kegiatan-kegiatan pariwisata yang dilaksanakan. Jadi setiap tindakan-tindakan yang diambil harus memang sesuai dengan prosedur tidak boleh keluar, karena kapan keluar sudah pasti menyimpang atau pelanggaran.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai telah memiliki SOP sebagai pedoman. Sehingga dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran dan kegiatan-kegiatan pariwisata telah sesuai dengan ketentuan dan sesuai prosedur. Dengan begitu penyimpangan atau pelanggaran bisa terhindarkan.

Hal senada juga disampaikan oleh informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Uraian pernyataannya sebagai berikut :

“Jelas ada prosedurnya. Setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedurnya atau aturan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu diluar dari pada prosedur, bisa kena sanksi. Jadi semua sudah ada jalurnya masing-masing tinggal dijalankan sebaik-baiknya.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Operational Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata dipastikan ada

dan telah dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan tindakan-tindakan terkait pelaksanaan kebijakan. Selain itu, SOP tersebut dijadikan sebagai jalur agar setiap tindakan yang diambil tidak keluar atau melanggar yang bisa menimbulkan diberikannya sanksi terhadap pelanggar.

Informan IM selaku Adyatama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga mengatakan bahwa :

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kebijakan ini pastinya ada aturan yang wajib ditaati. Karena semua yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan. Baik itu program-program yang dijalankan, penggunaan anggaran dan siapa-siapa yang terlibat, itu semua ada aturannya, ada prosedurnya.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ketika melaksanakan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk dijalankan atau ditaati. Sebab apa pun yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan. Hal tersebut meliputi program yang dijalankan, realisasi anggaran, maupun pihak-pihak berkepentingan yang terlibat.

2. Fragmentasi

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pariwisata, fragmentasi sangat penting untuk dilihat atau ditinjau. Hal tersebut untuk memastikan bagaimana pembagian tanggung jawab dan struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga ada kejelasan dan tidak terjadi tumpang tindih. Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata mengarah

pada keadaan saat proses pelaksanaan kebijakan pariwisata yang tidak saling terkoordinasi yang mengakibatkan ketidak jelasan dan kebingungan bagi aktor-aktor yang terlibat. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pariwisata tidak berjalan dengan lancar dan efektif akibat terjadinya ketidak sesuaian antar berbagai organisasi, struktur atau unit yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Berikut penjelasan dari informan TB selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai, berikut pernyataannya :

“kami pemerintah hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk mendorong agar bagaimana supaya dunia pariwisata di Kabupaten Sinjai bisa hidup dan berkembang. Makanya yang berperan penting dan utama sebenarnya adalah masyarakat. Sehingga didalam pelaksanaan kebijakan ini kita juga libatkan komunitas-komunitas lokal dan bahkan perguruan tinggi untuk memberikan kajian keilmuan. Jadi masing-masing pihak mempunyai perannya masing-masing.” (Hasil wawancara tanggal 21 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendorong agar masyarakat lokal tertarik dan berminat untuk terlibat dalam mengembangkan pariwisata daerah. Masyarakat lokal dianggap memiliki peran sentral untuk melakukan aktivitas-aktivitas pariwisata yang mampu menghidupi industri pariwisata daerah. Selain itu komunitas-komunitas lokal juga berperan untuk melakukan promosi, kontrol dan edukasi terkait

pengembangan pariwisata. Dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata, pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan kajian keilmuan tentang pengembangan pariwisata.

Informan MS selaku Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Juga memberikan pernyataannya sebagai berikut :

“Dalam kebijakan ini sebenarnya bukan hanya pemerintah saja, bukan kami saja yang bertanggung jawab. Pariwisata agar bisa maju perlu melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, pihak swasta, organisasi atau komunitas-komunitas dan bahkan perguruan tinggi. Itu ada perannya masing-masing. Contoh masyarakat disekitar objek wisata mereka juga punya peran untuk terlibat dalam hal melindungi dan merawat objek wisata, terlibat sebagai pegiat pariwisata. Kalau swasta setidaknya berperan aktif untuk mendukung pemerintah dalam hal program-program yang dilaksanakan. Selanjutnya tadi perguruan tinggi, bisa memberikan teori atau kajian keilmuan mengenai misalkan data analisis atau pengembangan pengetahuan pada sektor pariwisata. Jadi setiap pihak yang terlibat punya perannya masing-masing dan sering kami lakukan kordinasi atau kerja sama.” (Hasil wawancara tanggal 13 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat, swasta, komunitas, dan sampai perguruan tinggi. Kesemua pihak-pihak tersebut menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dengan jelas sesuai latar belakang yang dimiliki. Sehingga proses pelaksanaan kebijakan bisa efektif dan tidak terjadi tumpang-tindih yang bisa menghambat proses berjalannya kebijakan.

Selain itu selanjutnya informan AK selaku Sub Bagian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Tidak ada tumpang-tindih yang terjadi dalam pelaksanaan semuanya jelas sesuai tupoksi masing-masing bidang. Karena distruktur sudah jelas juga pembagiannya. Palingan hanya kerja sama atau kolaborasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Sama pihak luar pun demikian kita intens kordinasi sehingga semua berjalan dengan baik.”
(Hasil wawancara tanggal 15 November 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab sangat jelas dilakukan dan tidak terjadi tumpang tindih antar bidang begitu pun dengan pihak-pihak diluar pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena pihak pemerintah intens melakukan kordinasi terkait pelaksanaan kebijakan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan tentang keselarasan pembangunan yang terfokus pada objek wisata hutan mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai, bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana utama kebijakan disamping melakukan pembangunan dan pengembangan objek wisata, tetap berupaya untuk melakukan dan memperhatikan kelestarian lingkungan di objek wisata hutan mangrove

tongke-tongke sebagai wujud untuk mencapai keselarasan pembangunan antara objek wisata dengan lingkungan sekitar objek wisata. Ada pun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan pada objek wisata hutan mangrove tongke-tongke berupa pembangunan jembatan jalan untuk para pengunjung dan telah diperluas serta pembuatan menara-menara pandang. Disamping pembangunan infrastruktur yang dilakukan, tentunya juga dilakukan perbaikan kondisi hutan mangrove apabila ada terjadi kerusakan. Salah satu bentuk upaya untuk tetap menjaga kelestarian hutan mangrove yang rusak maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai melakukan proses penanaman kembali atau reboisasi pohon-pohon mangrove. Selain itu dilakukannya penyediaan tempat-tempat sampah untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran sampah pengunjung. Upaya lain juga yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang manfaat hutan mangrove dan pemahaman terkait bahaya pembalakan liar pada hutan mangrove. Sehingga dengan begitu bisa memberikan manfaat terhadap kelestarian hutan mangrove yang dijadikan sebagai objek wisata.

Dalam proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan juga yang ingin dicapai adalah wisata unggulan. Sebagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah menjadikan kawasan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke sebagai tempat wisata unggulan dan sebagai ikon wisata yang ada di Kabupaten

Sinjai. Hal tersebut berdasarkan banyaknya jumlah wisatawan yang datang dan juga memberikan pemasukan pendapatan terbesar kepada daerah. Sehingga untuk mempertahankan predikat tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai terus berupaya melakukan promosi wisata diberbagai media seperti pada media sosial instagram dan facebook serta media liputan kabar online. Selain itu juga sering kali diselenggarakannya berbagai acara festival budaya untuk menarik minat dan perhatian masyarakat umum terhadap pariwisata Kabupaten Sinjai. Disamping itu yang menjadi hal penting untuk diperhatikan adalah tentang pengadaan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada lokasi objek wisata hutan mangrove tongke-tongke. Sehingga dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan telah memberikan banyak perubahan terhadap jumlah pengunjung yang terus berdatangan di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke yang secara langsung memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah dari retribusi yang dilaksanakan. Berdasarkan hal inilah sehingga objek wisata hutan mangrove tongke-tongke sebagai satu-satunya objek wisata penghasil pendapatan daerah terbanyak ditiap tahunnya dan layak menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Sinjai.

Implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan selain dari menciptakan keselarasan dalam pembangunan dan mencapai wisata unggulan terdapat pula sasaran dalam pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

sebagai pelaksana telah melakukan pengembangan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke dan terutama juga untuk lapangan pekerjaan sebagai sasaran dalam pembangunan. Guna mendukung penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan maka dilakukan pengembangan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang berada disekitar objek wisata. Hal tersebut bertujuan agar dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan masyarakat bisa lebih produktif dan berpenghasilan sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat disekitar objek wisata hutan mangrove tongke-tongke.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai

a. Komunikasi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan dari segi komunikasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik disebabkan transmisi komunikasi telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui forum-forum rapat dan sosialisasi bersama dengan aparat desa, masyarakat, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar muatan kebijakan yang dilaksanakan bisa tersampaikan dengan baik dan benar, begitu pun dengan masyarakat yang memberikan saran dan masukan kepada pemerintah bisa diterima dengan baik pula.

Selain transmisi komunikasi terdapat pula kejelasan informasi sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Ada pun

informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pariwisata dianggap telah jelas tersampaikan dengan baik. Informasi-informasi yang tersampaikan bisa didapatkan dengan mudah melalui media internet atau laman web yang disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, selain itu ada juga melalui sosial media instagram dan media-media liputan lainnya. Dengan demikian segala informasi yang diberikan bisa didapatkan dengan jelas, terbuka dan bebas oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam komunikasi diperlukan juga konsistensi mengenai informasi yang diberikan. Kemudian untuk menjaga konsistensi dalam informasi maka dibuat perancangan tentang agenda program atau kegiatan yang telah ditetapkan bersama dan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata. Hal tersebut untuk memastikan kejelasan informasi yang disampaikan bisa konsisten berdasarkan rancangan yang telah dibuat.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai jika dilihat dari segi sumber daya manusia yang dimiliki telah memadai. Hal tersebut didukung oleh seringnya dilaksanakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kapasitas pengetahuan pegawai.

Selanjutnya sumber daya yang juga menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya finansial atau anggaran. Ada pun sumber-sumber dana yang didapatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata yaitu berasal dari APBN, DAK, APBD, DAU, dan dana hibah dari pemerintah provinsi. Meski demikian anggaran yang didapatkan terbilang belum cukup atau memadai untuk digunakan.

Kemudian untuk sumber daya material atau sarana dan prasarana yang dimiliki telah ada tersedia meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Ada pun kendala lain yang juga dialami termasuk untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut terjadi akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga menghambat proses pembangunan maupun pengembangan sarana dan prasarana maupun infrastruktur yang ada.

c. Disposisi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disposisi pada pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan telah berjalan dengan sangat baik. Dalam hal pengangkatan birokrasi pegawai yang akan bertugas dipilih dan dilihat dari jenjang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Selain itu dalam pengangkatan birokrasi pegawai juga aktif, responsif, dan memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan program kebijakan pariwisata. Pegawai sebagai pelaksana tugas juga

telah memiliki kompetensi, kinerja baik, serta memiliki minat dalam bidang pariwisata.

Selanjutnya pendukung keberhasilan yang lain yaitu insentif yang didapatkan. Sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi kepada pegawai maka insentif yang diberikan yaitu berupa uang atau gaji sesuai jabatannya masing-masing baik itu yang berstatus PNS, tenaga sukarela maupun petugas lapangan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan telah berjalan dengan baik. Salah satu indikator standar operasional prosedur (SOP) telah diberlakukan dan dijadikan sebagai pedoman atau pegangan didalam menjalankan segala program kebijakan pariwisata. Sehingga mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata.

Selanjutnya fragmentasi yang dilakukan juga telah berjalan dengan baik dan melibatkan beberapa pihak mulai dari masyarakat, organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Pembagian tugas dan tanggung jawab pun telah terbagi dengan jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Mulai dari masyarakat dan komunitas-komunitas lokal yang dilibatkan dalam edukasi pengembangan dan promosi pariwisata serta pihak perguruan tinggi yang ikut dilibatkan dalam proses penelitian dan kajian keilmuan untuk pengembangan pariwisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan :
 - a. Keselarasan pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan disekitar objek wisata hutan mangrove tongke-tongke.
 - b. Objek wisata hutan mangrove tongke-tongke sebagai objek wisata unggulan daerah dengan jumlah pengunjung terbanyak tiap tahunnya.
 - c. Sasaran pengembangan dari lapangan pekerjaan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal.
2. Keberhasilan implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan :
 - a. komunikasi informasi yang dilakukan telah jelas dilakukan kepada setiap aktor-aktor yang berkepentingan.
 - b. Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang didapatkan pun telah sesuai dengan yang dibutuhkan, meskipun dari segi sumber daya finansial, sarana dan prasarana masih terdapat beberapa kekurangan.

- c. Disposisi telah berjalan dengan baik untuk pemberian insentif maupun pengangkatan birokrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Struktur birokrasi telah berjalan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang kemudian nantinya diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap proses pelaksanaan kebijakan rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Sinjai. Beberapa saran tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* , baik itu kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pemerintah provinsi dan juga kepada investor-investor yang berminat dalam bidang pariwisata.
2. Mengembangkan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi dan akurat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pariwisata.
3. Mengembangkan infarastruktur pariwisata agar lebih memadai guna memberikan pelayanan pariwisata yang berkualitas.
4. Memberikan bantuan modal usaha UMKM kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dalam usaha kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf* (Kesatu). Alfabeta.
- Alaslan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Rajawali Pers* (Satu). Rajawali Pers.
- Amri, F. (2020). *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur*. UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU.
- Anindya Putri Raflesia Arifin. (2017). Pendekatan Community Based Tourism dalam Membina Hubungan Komunitas di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(01), 111–130.
- Apriliani, L., Rahmawati, & Agustino, L. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Air Panas Cisolong, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), 46–61.
- Bella Novitasari, Bandiyah, K. W. D. W. (2014). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI OBJEK WISATA PULAU MERAH KABUPATEN BANYUWANGI*.
- Chafid, F., & Muhammad. (2019). *Analisis Daya Dukung Lingkungan : Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2005). *Tourism: Principles and Practice*. Pearson Education.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice*. Pearson Education.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Gunawan, A. S., Goretti, M., & Endang, W. (2016). ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(1), 1–8.
- Handono, W. S. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DIESEASE*

2019 DI PROVINSI BALI. 7(2), 1–13.

- Herawati, H. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS OBJEKWISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN HULU KUANTAN) TAHUN 2021*. 483–494.
- Hidayat, R., Awaluddin, M., & Candra, C. (2019). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 85.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas (Pertama, Issue 1)*. UNG Press Gorontalo.
- Khan, A. R., & Khandaker, S. (2016). A critical insight into policy implementation and implementation performance. *Public Policy and Administration*, 15(4), 538–548.
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 87.
- Kurniawati, R. (2013). *Pariwisata Berkelanjutan* (p. 71).
- Lengkong, N. M. D., & Tampongangoy, D. (2015). *PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BITUNG*. III(31), 1–15.
- Lesmana, I. G. P. Y., & Purwanti, P. A. P. (2017). Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9, 843–872.
- Lisa, E. N., Paturusi, S. A., & Oka Prasiasa, D. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 4, 151–167.
- Matthew B. Miles, A. M. H. D. J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rded)*.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik (Pertama)*. CV.AA Rizky.
- Muh. Ramdhan. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2011-2015)* [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA].
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Pertama)*. PT Leutika

Nouvalitera.

- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Pertama, Issue April). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Nur R, A. H., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SEMARANG PADA OBYEK WISATA PALAGAN AMBARAWA*. 1–16.
- Nyoman Jamin Ariana, I., & Ariana, N. (2020). Identifikasi Integrasi Wisata Unggulan Antar Kabupaten Di Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 20(1), 1–8.
- Pradana, G. Y. K. (2019). Sosiologi pariwisata. In D. Lestari (Ed.), *STPBI Press* (Pertama, Vol. 1, Issue 1). STPBI PRESS.
- Pramana, A., Zamaya, Y., Rizhan, A., Riau, U., Binawidya, K., Baru Pekanbaru, S., islam kuantan singingi Teluk Kuantan, U., Jering, S., & Singingi, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pariwisata Pada Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 179–184.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik* (Pertama). Unisri Press.
- Purnamaningrum, & Tri Nugroho. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Krakal Di Kabupaten Gunungkidul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1), 35–42.
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
- Rifan, M., & Fikriya, H. I. (2021). Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata). *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 141–158.
- Salahudin Saiman, S. G. L. (2022). Studi Pembangunan Infrastruktur Pariwisata. *Jurnal Kawistara*, 12(3), 341.
- Satrio Wibowo, M., & Arviana Belia, L. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 25–32.
- Simamora, R. K., Rudi, D., & Sinaga, S. (2016). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

- dan Sosial Politik UMA Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(1), 79–96.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 79–90.
- Srisusilawati, P., Budi, H., & Haryanto, E. (2022). *Manajemen Pariwisata* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama, Issue Mi). Widina Media Utama.
- Strehlenert, H., Richter-Sundberg, L., Nyström, M. E., & Hasson, H. (2015). Evidence-informed policy formulation and implementation: A comparative case study of two national policies for improving health and social care in Sweden. *Implementation Science*, 10(1), 1–10.
- Suandi, N. I. dkk. (2022). Kebijakan Publik. In N. Rismawati (Ed.), *Kebijakan Publik* (Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi* (Pertama). Brilliant.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Sukmana, O. (2018). Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *Sosio Informa*, 4(3), 488–500.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Tangian, D., Si, M., Wowiling, R., & Si, M. (2020). *Pengantar Pariwisata*.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tresiana, Novita, N. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kpital Sosial dan Koproduksi*. Monograf.
- Tulumang, A. M., Kawung, G. M. ., & Layuck, I. A. . (2019). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pariwisata Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 24–35.
- Utama, I. G. B. R. (2014). *Pengantar Industri Pariwisata: Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif* (Pertama). DEEPUBLISH.
- Wahyu, Y. F., & Triani, M. (2023). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 9 Destinasi Wisata Favorit

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 19.

Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 6 No. 3 (2020), 6(1), 389.

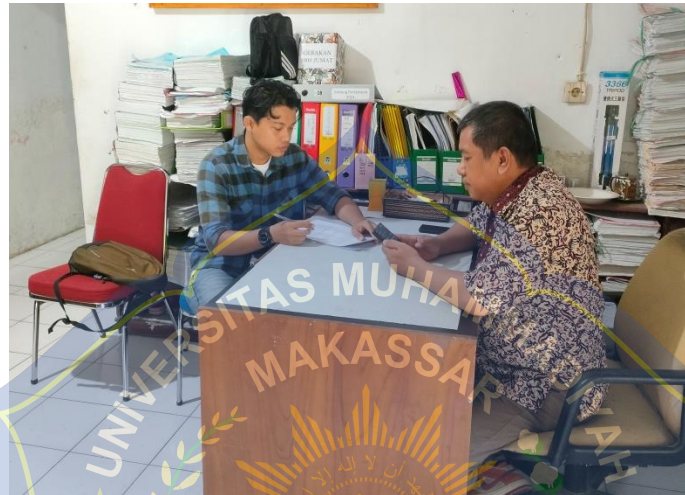
Winarno. (2013). *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani* (Kedua). Universitas Negeri Malang (UM PRESS).

Wirawan, P. E., & Semara, I. M. T. (2021). *Modul: Pengantar Pariwisata* (Pertama). IPB Internasional Press.

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita.







**Wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai**



**Wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata**

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Sub Bagian Program dan Keuangan



Wawancara bersama Bagian Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Wawancara Bersama Pengunjung



Wawancara bersama Pengunjung



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1597/A.2-II/X/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Rabiul akhir 1446 H.
15 Oktober 2024 M.

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di-

Makassar

أَسْكُرُكُمْ عَلَى كَرَمِ رُوحَتِهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

Berdasarkan Surat dari Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1923/A.2-II/X/1446/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawa ini :

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
No. Stambuk : 105031101321
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan : Magister Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa S2

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober 2024 s/d 23 Desember 2024

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَسْكُرُكُمْ عَلَى كَرَمِ رُوحَتِهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin., M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **26398/S.01/PTSP/2024**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1597/A.2-II/X/1446/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD IKHSAN**
Nomor Pokok : 105031101321
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Oktober s/d 23 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 001520/16/01/DPM-PTSP/X/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 26398/S.01/PTSP/2024, Tanggal 19 Oktober 2024 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/26 April 1993
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR
NIM : 195031101321
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : DUSUN SAPUBERU, Kel./Desa Pasimarannu, Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **IMPLENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPERIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Oktober s/d 23 Desember 2024
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Yang Bersangkutan (Muhammad Ikhsan)
4. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Ikhsan

Nim : 105031101321

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6%	10 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	15%	15 %
4	Bab 4	7%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Maret 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

Bab I Muhammad Ikhsan

105031101321

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Mar-2025 10:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2607597240

File name: BAB_I_-_2025-03-07T100145.505.docx (55.02K)

Word count: 2836

Character count: 20269

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Student Paper 1%
- 2 Submitted to Universitas Mulawarman
Student Paper 1%
- 3 ingreat.id
Internet Source 1%
- 4 123dok.com
Internet Source 1%
- 5 Dewa Putu Bagus Pujawan Putra.
"PENGEMBANGAN DESA WISATA
CARANGSARI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
LOKAL", Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2020
Publication <1%
- 6 kukuhhardopo.blogspot.com
Internet Source <1%
- 7 mail.i-scholar.in
Internet Source <1%
- 8 ojs.unud.ac.id
Internet Source <1%
- 9 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source <1%
- 10 repositori.umsu.ac.id
Internet Source

<1 %

11

zh.scribd.com

Internet Source

<1 %

12

Wardana Wardana. "Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur", Tanah Pilih, 2021

Publication

<1 %

13

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

14

preussenfieber.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



Bab II Muhammad Ikhsan

105031101321

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Mar-2025 10:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2607598912

File name: BAB_II_-_2025-03-07T100143.222.docx (624.04K)

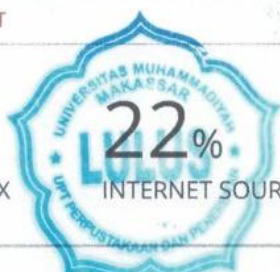
Word count: 3885

Character count: 27027

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX



22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	4%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
3	repository.feb.uns.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.untirta.ac.id Internet Source	2%
6	duniadwilestari5796.blogspot.com Internet Source	1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
8	www.slideshare.net Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
10	archive.org Internet Source	1%
11	id.scribd.com Internet Source	1%
12	media.neliti.com Internet Source	

		1 %
13	repository.ung.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
15	ejournal.sumselfprov.go.id Internet Source	1 %
16	Moh Agus Sutiarmo. "PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKOWISATA", Open Science Framework, 2018 Publication	1 %
17	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	1 %
18	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
19	amptajurnal.ac.id Internet Source	1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Bab III Muhammad Ikhsan

105031101321

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Mar-2025 10:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2607599308

File name: BAB_III_-_2025-03-07T100145.102.docx (53.24K)

Word count: 726

Character count: 5239

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	5%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	dosen.upi-yai.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	1%
7	doku.pub Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Bab IV Muhammad Ikhsan

105031101321

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Mar-2025 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2607600198

File name: BAB_IV_-_2025-03-07T100143.735.docx (434.8K)

Word count: 11647

Character count: 78778

Bab IV Muhammad Ikhsan 105031101321

ORIGINALITY REPORT

7 % **LULUS** **7** %

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

5 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal-umsi.ac.id
Internet Source

2 %

2 disparbud.sinjaikab.go.id
Internet Source

1 %

3 ejournal-poltekparmks.ac.id
Internet Source

1 %

4 www.scribd.com
Internet Source

1 %

5 repository.uinjambi.ac.id
Internet Source

1 %

6 Hamdan Hamdan, Yudhi Lestanata, Amil Amil.
"Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam
Kegiatan Promosi Pariwisata Di Kabupaten
Lombok Tengah", Journal of Government and
Politics (JGOP), 2021
Publication

1 %

7 repository.stkippacitan.ac.id
Internet Source

1 %

8 core.ac.uk
Internet Source

1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Bab V Muhammad Ikhsan

105031101321

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Mar-2025 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2607601180

File name: BAB_V_-_2025-03-07T100144.325.docx (43.89K)

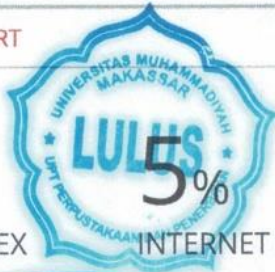
Word count: 273

Character count: 1899

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositories.usu.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 1%

